



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

*Menyukkseskan Transformasi Ekonomi melalui Penguatan
Potensi Regional dan Menjaga Risiko Fiskal*

Edisi Agustus 2023



EXECUTIVE SUMMARY

- Di tengah tren perlambatan perekonomian global, **Kinerja Makroekonomi Regional** menunjukkan **peningkatan yang konsisten** diatas 5% pada kuartal II tahun 2023. Perbaikan capaian makroekonomi terlihat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah-daerah Indonesia yang tangguh secara ekonomi dalam menghadapi risiko ancaman krisis. Kinerja tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk mendukung transformasi ekonomi.
- Ketahanan ekonomi daerah akan memperlancar pertumbuhan serta perkembangan sektor ekonomi di daerah termasuk sektor unggulan. Pengembangan sektoral masing-masing daerah harus dilakukan berdasarkan potensi daerah. Oleh karena itu, identifikasi sektor unggulan, potensi sektor-sektor tersebut di masa mendatang, dan bagaimana sektor unggulan daerah satu dibandingkan dengan daerah lainnya perlu diidentifikasi. Langkah identifikasi tersebut akan dibahas dalam tajuk **Kinerja Ekonomi Spasial dan Sektoral Daerah** melalui empat metode, yaitu *Location Quotient (LQ)*, *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis *Overlay*. Analisis ini bermanfaat dalam proses **penentuan prioritas pembangunan** yang memerlukan komitmen besar dari pemda maupun pemerintah pusat dalam memfasilitasi dukungan untuk sektor unggulan, potensial dan menonjol sehingga mampu menjadi katalisator pertumbuhan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Dukungan dan fasilitasi yang merupakan bentuk komitmen baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini dapat dilihat dari kinerja Transfer ke Daerah dan Kinerja Fiskal Daerah. **Kinerja Transfer ke Daerah** sampai dengan akhir Juli 2023 mencapai Rp440,9 Triliun atau tersalur 54,1% dari pagu alokasi TKD 223. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kinerja TKD secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 6,6% YoY. Peningkatan tersebut terutama karena terdapat kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Masih terdapat beberapa jenis TKD yang kinerja penyalurannya masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama karena pemda sedang menyiapkan syarat penyaluran.
- Adapun dari sisi **Kinerja Fiskal Daerah** sampai dengan bulan Juli 2023 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu baik dalam aspek pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah tumbuh selaras dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. Dari aspek Belanja Daerah, serapan APBD terus membaik akibat terjadinya peningkatan realisasi yang terjadi pada seluruh jenis belanja baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja lainnya. Kinerja fiskal daerah tersebut perlu terus dipertahankan hingga akhir tahun agar perekonomian daerah terus tumbuh. Strategi yang perlu dilakukan adalah bagaimana penggunaan TKD melalui Belanja menjadi tepat sasaran dan lebih *timely*. Keterlambatan eksekusi penyerapan belanja di daerah akan memperlambat akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.



EXECUTIVE SUMMARY

- Hal lain yang diperlukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi adalah kinerja reformasi struktural. Dengan percepatan proses Reformasi Struktural diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan investasi, dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung oleh perbaikan regulasi. Oleh karena itu, dalam laporan ini, tajuk **Kinerja Reformasi Struktural Daerah** akan membahas performa reformasi struktural di tiap-tiap region dengan menggunakan pendekatan *z-score* pada indikator kinerja tertentu yang dimodifikasi dari *World Bank* (2020). Dengan pemantauan perkembangan reformasi struktural tersebut, kita bisa melihat keunggulan dan kekurangan dari masing-masing wilayah dalam mendukung reformasi struktural di Indonesia.
- Salah satu faktor penting yang perlu dioptimalkan dalam mempercepat reformasi struktural adalah pelayanan publik. Tajuk **Kinerja Pelayanan Publik** membahas mengenai potret sosial ekonomi daerah yang diukur melalui indeks sosial ekonomi yang diharapkan dapat mencerminkan gambaran sosial ekonomi masyarakat di daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
- Efektivitas kebijakan fiskal juga diperlukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi. Salah satu strategi penguatan efektivitas tersebut adalah melalui manajemen risiko fiskal termasuk di dalamnya risiko fiskal yang bersumber dari daerah. Untuk itu, tajuk **Kajian Khusus** dalam edisi kali ini akan membahas mengenai Urgensi *Assessment* Risiko Fiskal Daerah dengan Studi Kasus Provinsi Riau. Kajian tersebut akan mengulas potensi dampak fluktuasi harga minyak terhadap penerimaan daerah dan mitigasi yang diperlukan agar fiskal daerah dan pusat tetap terjaga. Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah menjadi sebuah "*Early Warning System*" daerah yang dapat dimitigasi melalui kebijakan TKD yang tepat.
- Sebagai penutup, untuk melengkapi topik Kajian Khusus, tajuk **Inovasi Daerah** membahas tentang Inovasi Daerah Provinsi DIY yang menjadi percontohan dalam *Assessment* Risiko Fiskal melalui Program Difagana Pioner Penanggulangan Bencana Berbasis Inklusi. Tajuk ini diharapkan dapat memberikan referensi, motivasi, serta inspirasi kepada Pemda lain agar dapat mencontoh inovasi yang bermanfaat sesuai kebutuhan daerahnya.
- Keseluruhan LPEFD ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran sekaligus rekomendasi bagi para pembaca dan pemangku kepentingan demi mensukseskan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara maju dan dapat keluar dari Middle Income Trap melalui tema besar "**Menyukseskan Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Potensi Regional dan Menjaga Risiko Fiskal**"



DAFTAR ISI

<i>Executive Summary</i>	2
Daftar Isi	4
Kinerja Makroekonomi Regional	5
Kinerja Ekonomi Spasial dan Sektoral Daerah	8
Kinerja Transfer ke Daerah	15
Kinerja Fiskal Daerah	20
Perekembangan Reformasi Struktural Indonesia	26
Kinerja Pelayanan Publik	31
Kajian Khusus	36
Inovasi Daerah	40

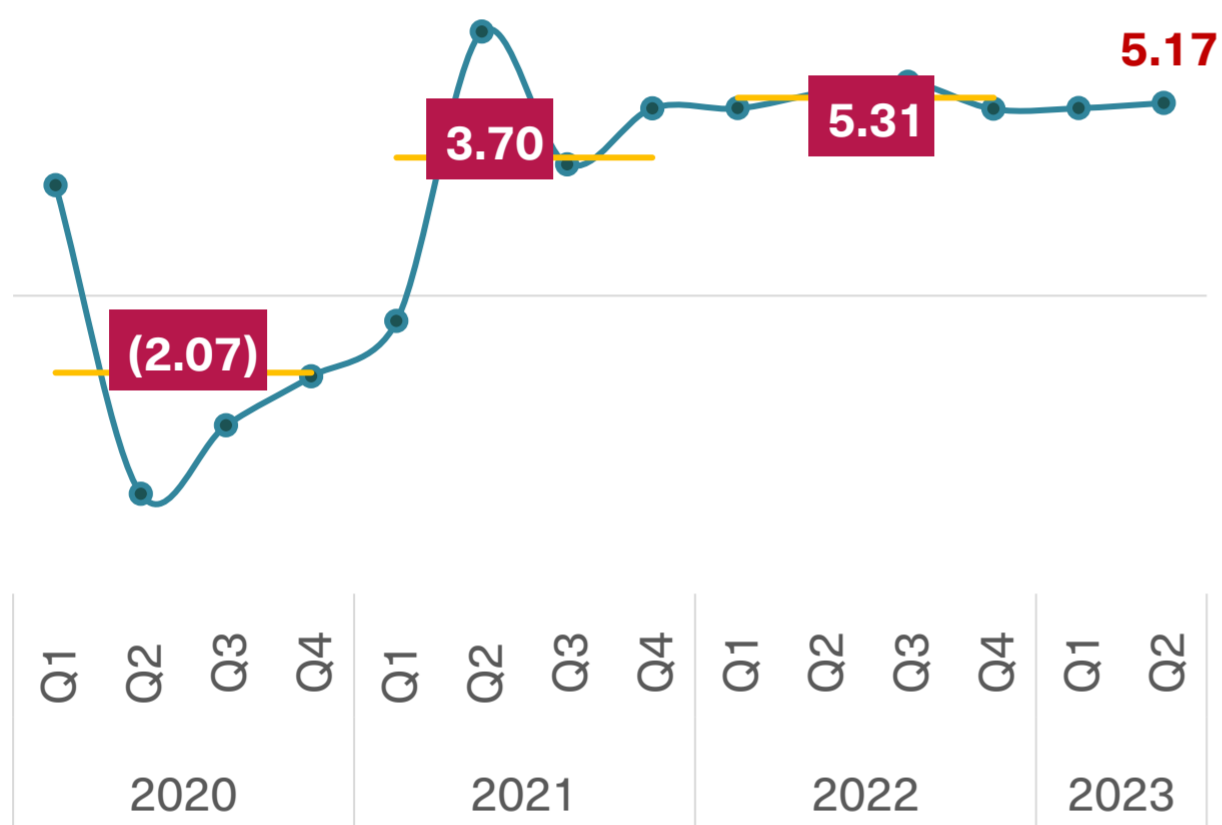




KINERJA MAKROEKONOMI REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi

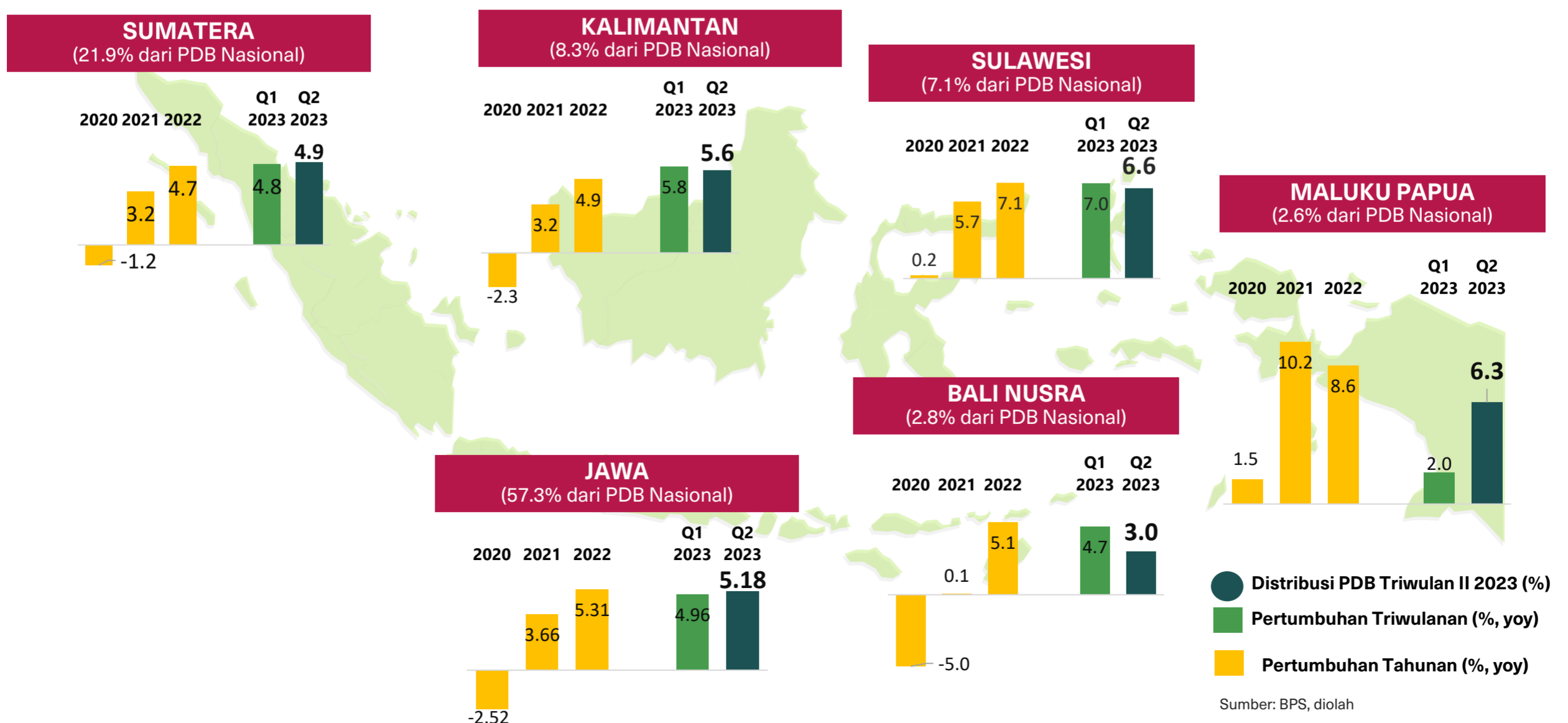
Grafik 1 – Distribusi Pertumbuhan Ekonomi Spasial



Pertumbuhan **ekonomi Indonesia pada kuartal II 2023 tumbuh sebesar sebesar 5,17% (y-o-y)**. Pertumbuhan kuartal 2 lebih tinggi dari kuartal I atau 3,86% (q-to-q) sejalan dengan pola di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kondisi perekonomian **global mengalami pelemahan** serta penurunan harga komoditas di pasar global, namun **ekonomi Indonesia terus melanjutkan tren di atas 5% pada kuartal II tahun 2023** yang menandakan ketahanan dan prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Adapun secara spasial, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi wilayah Pulau Jawa sebesar 57,3%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh wilayah Pulau Sulawesi sebesar 6,6% sedangkan pertumbuhan terendah dicapai oleh wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

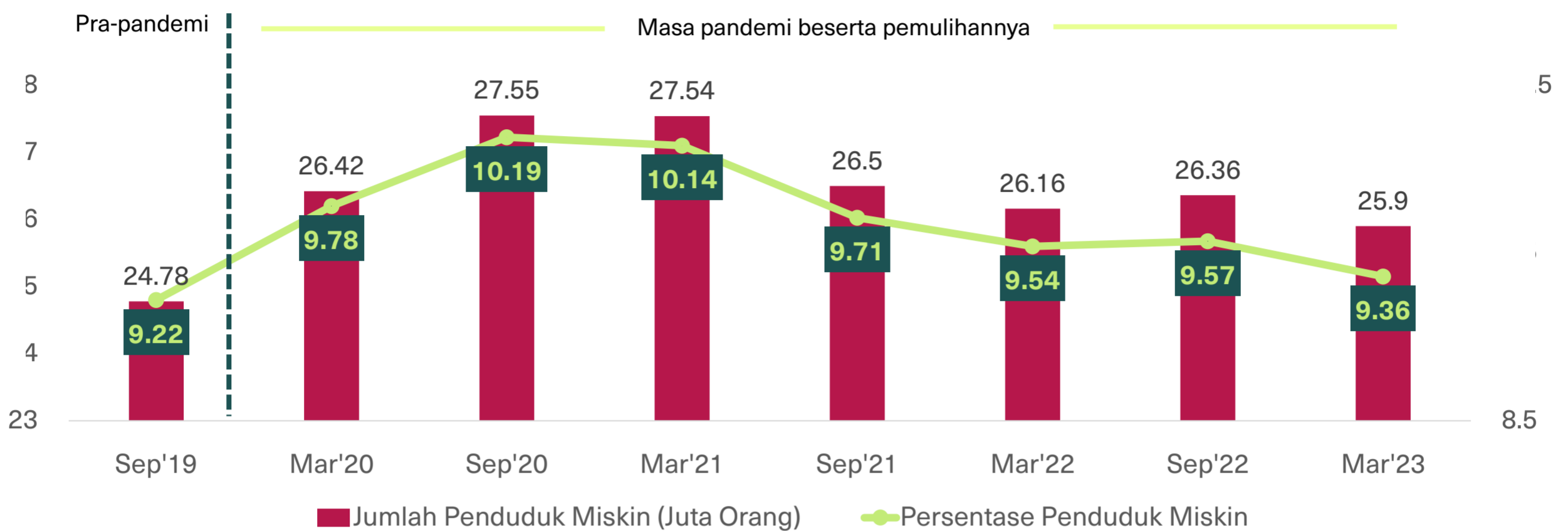
Grafik 2 – Distribusi Pertumbuhan Ekonomi Spasial



Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan PDB. Sementara, konsumsi Pemerintah yang memiliki kontribusi sebesar 7,5% PDB mencatatkan pertumbuhan tertinggi dibanding komponen lain, yakni sebesar 10,6% di kuartal II. Hal ini menunjukkan dukungan APBN terhadap perekonomian yang bersifat ekspansif.

Tingkat Kemiskinan

Grafik 3 – Tren Kemiskinan September 2019 s.d Maret 2023

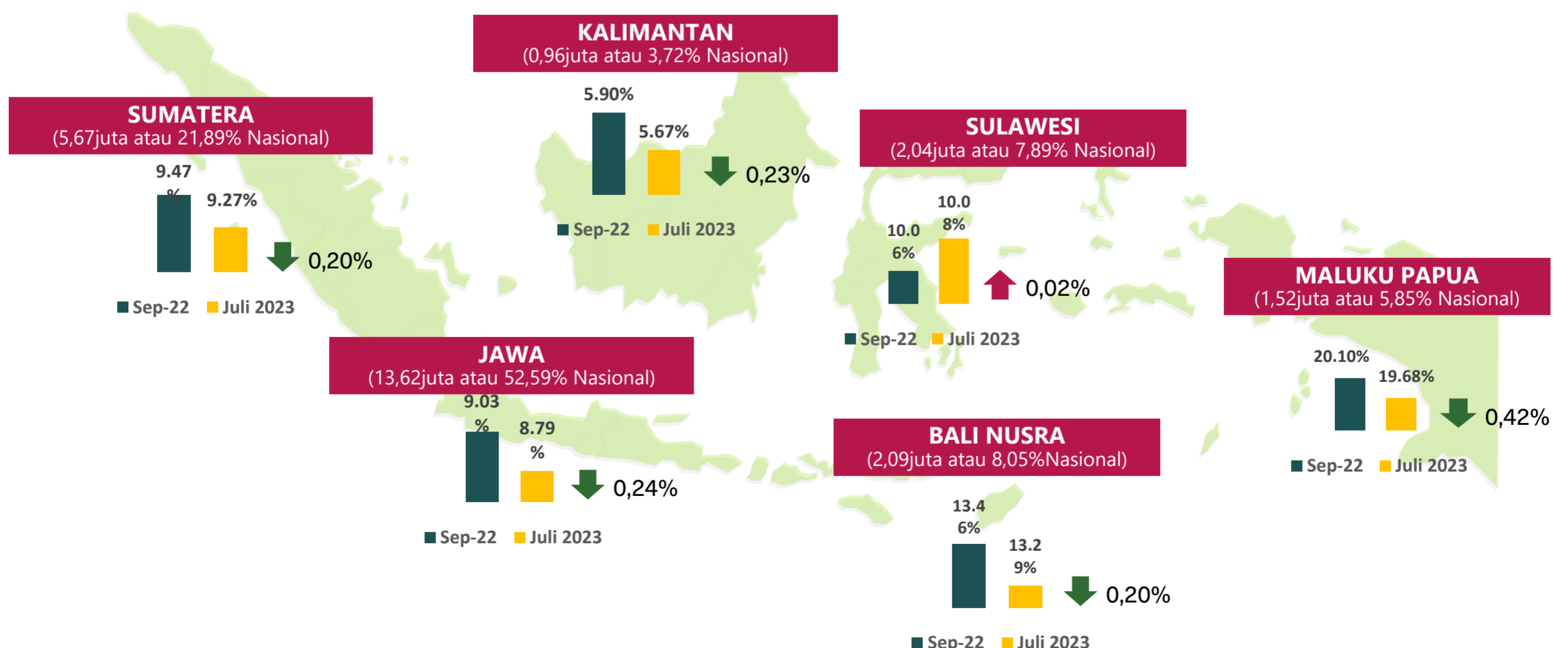


Sumber: BPS

Kualitas pertumbuhan ekonomi kita juga semakin baik dimana terlihat bahwa manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat. Tingkat kemiskinan terus menurun, dari 9,54% di Maret 2022, turun menjadi 9,36% di Maret 2023. Pertumbuhan ekonomi juga telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dimana terjadi tingkat pengangguran dari 5,83% Di Februari 2022 menjadi 5,45% di Februari 2023.

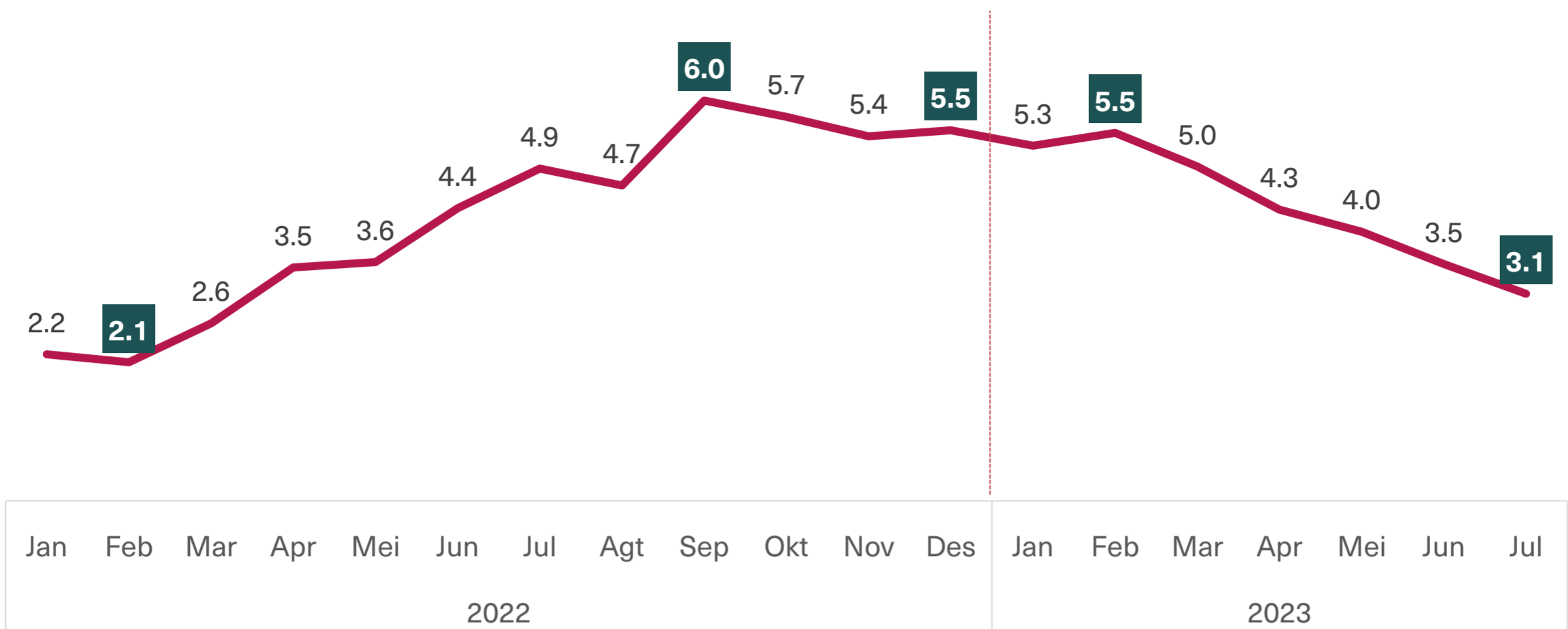
Secara spasial persentase penduduk miskin tertinggi berada di wilayah Maluku dan Papua sebesar 19,68% sedangkan persentase penduduk miskin terendah berada di wilayah Kalimantan sebesar 5,67%. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin tertinggi masih berada di wilayah Jawa sebanyak 13,62 juta orang atau 52,59% dari total penduduk miskin, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di wilayah Kalimantan sebesar 0,96 juta orang atau 3,72% dari penduduk miskin. Sementara itu, penurunan persentase penduduk miskin terjadi di seluruh pulau kecuali Pulau Sulawesi, sedangkan penurunan persentase tertinggi penduduk miskin dicapai oleh wilayah Pulau Maluku dan Papua sebesar 0,42%.

Grafik 4 – Distribusi Tingkat Kemiskinan secara Spasial



Sumber: BPS diolah

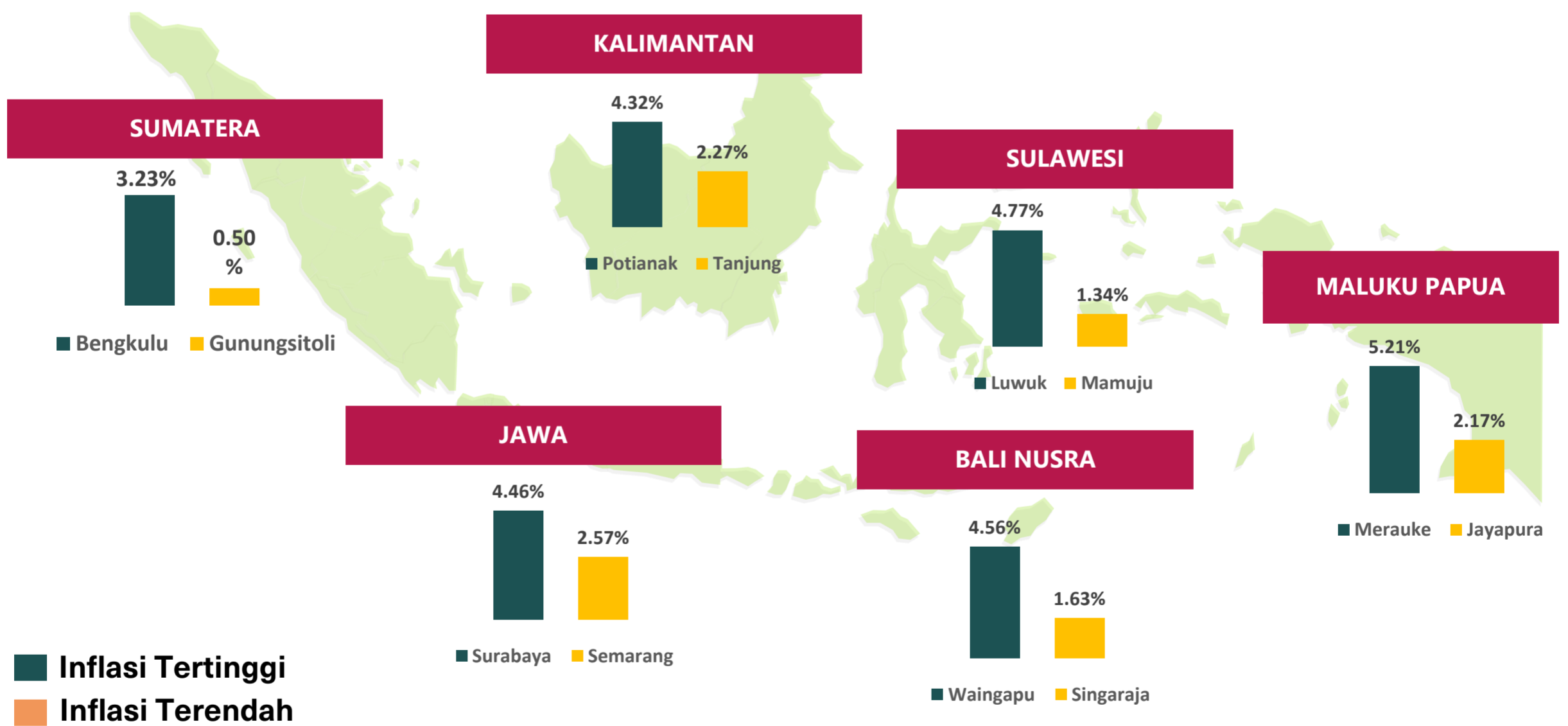
Grafik 5 – Tren Inflasi 2022-2023



Sumber: BPS, diolah

Di sisi lain, **inflasi menunjukkan tren penurunan** sejak Maret 2023 dan tercatat di bulan Juli inflasi berada pada 3,1% lebih rendah dibanding inflasi Juli 2022 (4,94%). Berbeda dengan tahun 2022 di mana bulan Februari inflasi berada di titik terendah, pada 2023 peningkatan inflasi pada Bulan Februari disebabkan oleh *volatile food* diantaranya bawang merah, bawang putih, dan beras akibat perbedaan musim panen dan gangguan cuaca. Namun begitu, tren penurunan inflasi yang terus terjadi berpotensi mendukung tingkat konsumsi masyarakat.

Grafik 6 – Distribusi Tingkat Inflasi secara Spasial



Sumber: BPS, diolah (data inflasi 90 kota)

Sementara itu jika dilihat dari wilayah, kota Merauke memiliki inflasi tertinggi dengan tingkat inflasi mencapai 5,21% dengan empat komoditas penyumbang inflasi terbesar yaitu beras (0,34%), bensin (0,56%), rokok putih (0,39%), dan rokok kretek filter (0,36%), sedangkan inflasi terendah berada di kota Gunungsitoli dengan inflasi sebesar 0,50% yoy.



Keberagaman wilayah di Indonesia menjadikan potensi daerah memiliki keunggulan dan tantangan yang bervariasi. Maka dari itu, analisis **penentuan sektor unggulan** untuk dapat mengungkit kinerja perekonomian daerah penting untuk dilakukan. Tajuk ini bertujuan untuk menyajikan hasil analisis sektoral dan spasial agar dapat memberikan gambaran umum mengenai sektor lapangan usaha yang secara statistik diduga dapat menjadi *leading sector* di masing-masing daerah. Dengan menggunakan 4 metode analisis yakni, *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis *Overlay*, serta dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016-2022, tajuk ini akan memetakan sektor lapangan usaha yang merupakan sektor basis, sektor potensial, dan mengklasifikasikan sektor yang memiliki keunggulan komparatif serta dominan pada setiap wilayah/ regional. Dengan mengetahui hasil analisis ini, diharapkan pengembangan sektoral di daerah dapat lebih terarah dan optimal sesuai dengan potensinya.

Sebelum beranjak ke pembahasan lebih lanjut, perlu kita ketahui secara umum tentang keempat metode yang digunakan. Yang pertama, LQ merupakan analisis perbandingan peran sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor/industri tersebut secara nasional. Melalui metode ini, kita dapat mengetahui sektor basis suatu daerah di tahun yang bersangkutan. Kelemahan metode ini adalah bersifat statis. Kelemahan ini dapat diatasi oleh metode yang kedua yakni DLQ di mana perbandingan peran sektor/industri di suatu daerah dibanding nasional dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan masing-masing sektor sehingga dapat mengetahui sektor yang tidak hanya menjadi basis di tahun tertentu namun juga potensial di masa depan. Untuk melengkapi metode DLQ, dilakukan analisis yang ketiga yakni analisis MRP yang mampu melihat perbandingan laju pertumbuhan suatu sektor di suatu daerah dibandingkan dengan laju sektor tersebut secara nasional. Namun ketiga model ini belum mampu melihat dominasi dan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing sektor, maka dari itu diperlukan analisis yang keempat yakni analisis *Overlay* untuk mendeskripsikan kegiatan ekonomi yang potensial, dengan menggunakan kriteria pertumbuhan dan kriteria keunggulan komparatif.

Analisis LQ dan DLQ diawali dengan mengklasifikasikan sektor yang merupakan sektor basis sekaligus sektor potensial ($LQ > 1$ dan $DLQ > 1$). Berdasarkan hasil ini, didapatkan 138 observasi sektor yang tersebar di 34 provinsi. Selanjutnya, analisis pertama adalah dengan mengurutkan peringkat sektor yang memiliki nilai rerata LQ tertinggi. Berdasarkan peringkat ini, didapatkan bahwa Provinsi Maluku dengan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor yang memiliki rerata LQ tertinggi. Namun, sektor ini tidak serta merta dapat menjadi sektor unggulan karena bukan merupakan sektor yang berbasis sumber daya daerah. Besarnya peranan sektor ini justru menggambarkan masih tingginya ketergantungan terhadap administrasi pemerintahan. Hal serupa juga dijumpai pada Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya sektor dengan rerata LQ tertinggi kedua adalah sektor Pertambangan dan Penggalian utamanya di wilayah Kalimantan dan Papua. Sektor ini dapat menjadi sektor unggulan yang berbasis sumber daya daerah baik di masa sekarang maupun di masa depan (dilihat dari nilai $DLQ > 1$). Batu bara di Kalimantan dan emas di Papua merupakan komoditas yang hingga saat ini masih memegang peranan besar dalam perekonomian daerah Kalimantan dan Papua.

Tabel 1 – Top 10 Provinsi berdasarkan Rerata LQ

NO	PROVINSI	SEKTOR	Rerata LQ	DLQ
1	Provinsi Maluku	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.11	1.089
2	Provinsi Kalimantan Timur	Pertambangan dan Penggalian	6.04	2.664
3	Provinsi Bali	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.7	1.379
4	Provinsi Maluku	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.31	1.275
5	Provinsi Papua	Pertambangan dan Penggalian	4.94	2.664
6	Provinsi Kalimantan Selatan	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.74	1.275
7	Provinsi Maluku Utara	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.31	1.089
8	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.88	1.089
9	Provinsi Kalimantan Utara	Pertambangan dan Penggalian	3.48	2.664
10	Provinsi Sulawesi Utara	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.48	1.039

Sumber: BPS, diolah

Selanjutnya, dilakukan analisis dengan mengurutkan sektor berdasarkan DLQ tertinggi. Hasil yang didapatkan cukup menarik karena didapatkan pola sektor tertentu dengan peringkat tertentu seperti yang telah dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2 – Urutan Peringkat Sektor Basis dan Potensial

NO	SEKTOR	PERINGKAT	JUMLAH PROVINSI
1	Pertambangan dan Penggalian	1 s.d 16	16
2	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17 s.d 21	5
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22 s.d 41	20
4	Jasa Pendidikan	42 s.d 56	15
5	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	57 s.d 79	23
6	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	80 s.d 104	25
7	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105 s.d 126	22
8	Real Estat	127 s.d 138	12

Sumber: BPS, diolah



Dari 138 sektor di 34 provinsi yang memiliki klasifikasi sektor basis sekaligus sektor potensial, peringkat 1 sampai dengan 16 merupakan **sektor Pertambangan dan Penggalian**. Tiga provinsi dengan DLQ tertinggi untuk sektor ini adalah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua, dan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini sejalan dengan temuan analisis peringkat LQ sebelumnya. Sektor dengan DLQ tertinggi kedua berikutnya adalah sektor Penyediaan **Akomodasi dan Makan Minum** yang terdapat di 5 provinsi dengan yang tertinggi di Provinsi Bali kemudian disusul Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian kedua provinsi tersebut yang memiliki keunggulan pariwisata. Artinya ke depan sektor ini memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan. Hal menarik berikutnya yang perlu di-*highlight* adalah **sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** yang merupakan sektor primer dan masih tetap memiliki potensi di masa depan pada 25 provinsi dengan 3 provinsi tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Lampung.

Banyaknya jumlah provinsi yang memiliki potensi di sektor primer ini memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Di satu sisi, artinya di masa depan potensi sektor masih cenderung berada di sektor primer, di sisi lain sektor ini merupakan sektor krusial yang terkait langsung dengan kapasitas ketahanan pangan Indonesia. Strategi yang perlu dilakukan adalah salah satunya dengan kebijakan hilirisasi industri sektor primer yang menambah nilai tambah (*value added*) produk olahan sehingga daya saing produk juga meningkat baik di dalam maupun luar daerah. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor lainnya seperti industri pengolahan makanan dan minuman yang juga bermanfaat bagi masyarakat dari sisi konsumsi maupun lapangan pekerjaan. Proses dalam akselerasi pertumbuhan sektor primer yang dilakukan dalam bentuk hilirisasi sektor industrinya dapat mendorong percepatan terjadinya reformasi struktural yang berguna dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Hasil Estimasi Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan suatu metode yang tepat untuk mengetahui keunggulan sektor ekonomi suatu daerah dibandingkan dengan wilayah referensi yaitu Indonesia sebagai level administrasi di atasnya. MRP ini menurut Suyata Utama (2010) terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) yaitu perbandingan pendapatan sektor ekonomi wilayah daerah studi dengan wilayah referensi.
- Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) yaitu perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan sektor ekonomi di wilayah referensi dan pertumbuhan total wilayah referensi.

Melalui perbandingan PDRB Wilayah daerah provinsi dengan PDRB Wilayah Indonesia, terdapat **empat klasifikasi** atas pertumbuhan sektoral daerah yaitu **dominan pertumbuhan dan menonjol**, **dominan pertumbuhan tetapi tidak menonjol**, **rendah pertumbuhan tetapi menonjol**, dan **rendah pertumbuhan tetapi tidak menonjol**.

Hasil olah data PDRB sektoral 34 provinsi menunjukkan sektor ekonomi yang memiliki **dominan pertumbuhan dan menonjol** dibandingkan nasional, yaitu sektor komunikasi dan informasi dan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor pertambangan dan penggalian pada daerah-daerah penghasil dan jasa perusahaan juga memiliki **pertumbuhan yang dominan namun menonjol** dibandingkan dengan wilayah referensi yaitu nasional. Sedangkan ada beberapa sektor yang memiliki **pertumbuhan dominan dan tetapi tidak menonjol** seperti Pengadaan makan minum dan Perdagangan, Industri Pengolahan, Jasa Pendidikan, Transportasi Pergudangan, dan Konstruksi. Kemudian, ada juga yang memiliki **stagnansi pertumbuhan dan tidak menonjol** yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

Secara regional, perbedaan klasifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 – Perbedaan Klasifikasi Sektoral

PULAU	SEKTOR	KLASIFIKASI
Jawa, Sumatera dan Sulawesi	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi dan Komunikasi • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Perusahaan 	Dominan Pertumbuhan dan Menonjol
Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Informasi dan Komunikasi • Pertambangan dan Penggalian 	
Maluku Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan dan Penggalian 	
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Makanan dan Minuman • Jasa Pendidikan • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 	Dominan Pertumbuhan tetapi Tidak Menonjol
Bali Nusa Tenggara, Maluku Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Keuangan dan Asuransi 	Rendah tetapi Menonjol
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Maluku Papua, Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan makan minum dan Perdagangan, • Industri Pengolahan, • Jasa Pendidikan, • Transportasi Pergudangan, dan • Konstruksi. 	
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Maluku Papua, Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta • Jasa Keuangan dan Asuransi 	

Sumber: BPS, diolah

Dari tabel tersebut dengan metode proporsi pertumbuhan, Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi memiliki kesamaan klasifikasi pertumbuhan yang menonjol yaitu sektor tersier yaitu informasi dan komunikasi serta jasa keuangan dan sosial. Sementara itu, Kalimantan, Maluku, dan Papua mengandalkan sumber daya alam seperti pertambangan dan penggalian sebagai motor penggerak pertumbuhan. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih belum optimal pertumbuhannya dan hal ini juga berpengaruh di sisi pengadaan makan dan minum. Oleh karena itu, sektor primer masih perlu ditingkatkan lebih jauh dengan menambah nilai tambah produk.

Hasil Estimasi *Overlay*

Analisis *Overlay* merupakan analisis yang mendeskripsikan kegiatan ekonomi yang potensial dengan kriteria pertumbuhan (Rasio Pertumbuhan) dan keunggulan komparatif (*Local Quotient*). Klasifikasi yang menggabungkan kriteria ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. RPs >1 dan LQ >=1 memiliki arti pertumbuhan dominan dan komparatif
2. RPs >1 dan LQ <=1 memiliki arti pertumbuhan dominan tetapi tidak ada keunggulan komparatif
3. RPs <1 dan LQ >=1 memiliki arti kegiatan pertumbuhan rendah tapi memiliki keunggulan komparatif
4. RPs <1 dan LQ <=1 memiliki arti kegiatan dengan pertumbuhan rendah dan tidak potensial

Berdasarkan penggabungan metode tersebut maka didapatkan kesimpulan menarik di hampir seluruh pulau sebagai berikut.

- a. **Sektor informasi dan komunikasi** yang memiliki dominan pertumbuhan tetapi belum menjadi keunggulan komparatif
- b. **Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial** memiliki rendah pertumbuhannya tetapi memiliki keunggulan komparatif yang cukup
- c. Untuk **sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan** menjadi dominan potensial pada Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, dan Utara. Kondisi ini juga didapatkan pada wilayah Sumatera dan Sulawesi.
- d. Untuk **sektor pertambangan dan penggalian** ada perbedaan karakteristik dimana pada Region Kalimantan Utara dan Tengah serta Maluku Utara menjadi dominan dan potensial. Sementara itu Papua dan Papua Barat masih memiliki pertumbuhan rendah tetapi potensial untuk dikembangkan karena keunggulan komparatifnya. Adapun lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 – Hasil *Overlay* Sektor Pertambangan dan Penggalian

Region	Provinsi	Overlay
Kalimantan	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rendah tak potensial
Kalimantan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Dominan potensial
Kalimantan	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rendah potensial
Kalimantan	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rendah potensial
Kalimantan	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Dominan potensial
Maluku Papua	PROVINSI MALUKU	Rendah tak potensial
Maluku Papua	PROVINSI MALUKU UTARA	Dominan potensial
Maluku Papua	PROVINSI PAPUA BARAT	Rendah potensial
Maluku Papua	PROVINSI PAPUA	Rendah potensial

Sumber: BPS, diolah

Dari gabungan keseluruhan analisis, mulai dari sektor unggulan komparatif (LQ), potensial sektor unggulan di masa mendatang (DLQ), Proporsi pertumbuhan perbandingannya dengan level nasional (MRP), maka didapatkan kesimpulan bahwa sektor yang memiliki nilai positif lebih banyak di salah satu sisi atau semuanya yaitu LQ > 1, DLQ > 1, MRP (RPs + dan RPr +) maka sektor tersebut memiliki nilai prioritas dikembangkan lebih besar. Misalnya, nilai positif atau > 1 di semua sisi maka nilai prioritas dikembangkan adalah 4. Nilai ini akan berkurang jika ada nilai yang < 1 atau MRPnya negatif seperti 1 atau nol jika tidak ada yang positif atau LQ dan DLQ < 1.

Dari hasil olah data dan gabungan analisis, maka didapat ringkasan sebagaimana dalam Tabel 5.

Tabel 5 – Ringkasan Hasil Estimasi Sektoral *Overlay*

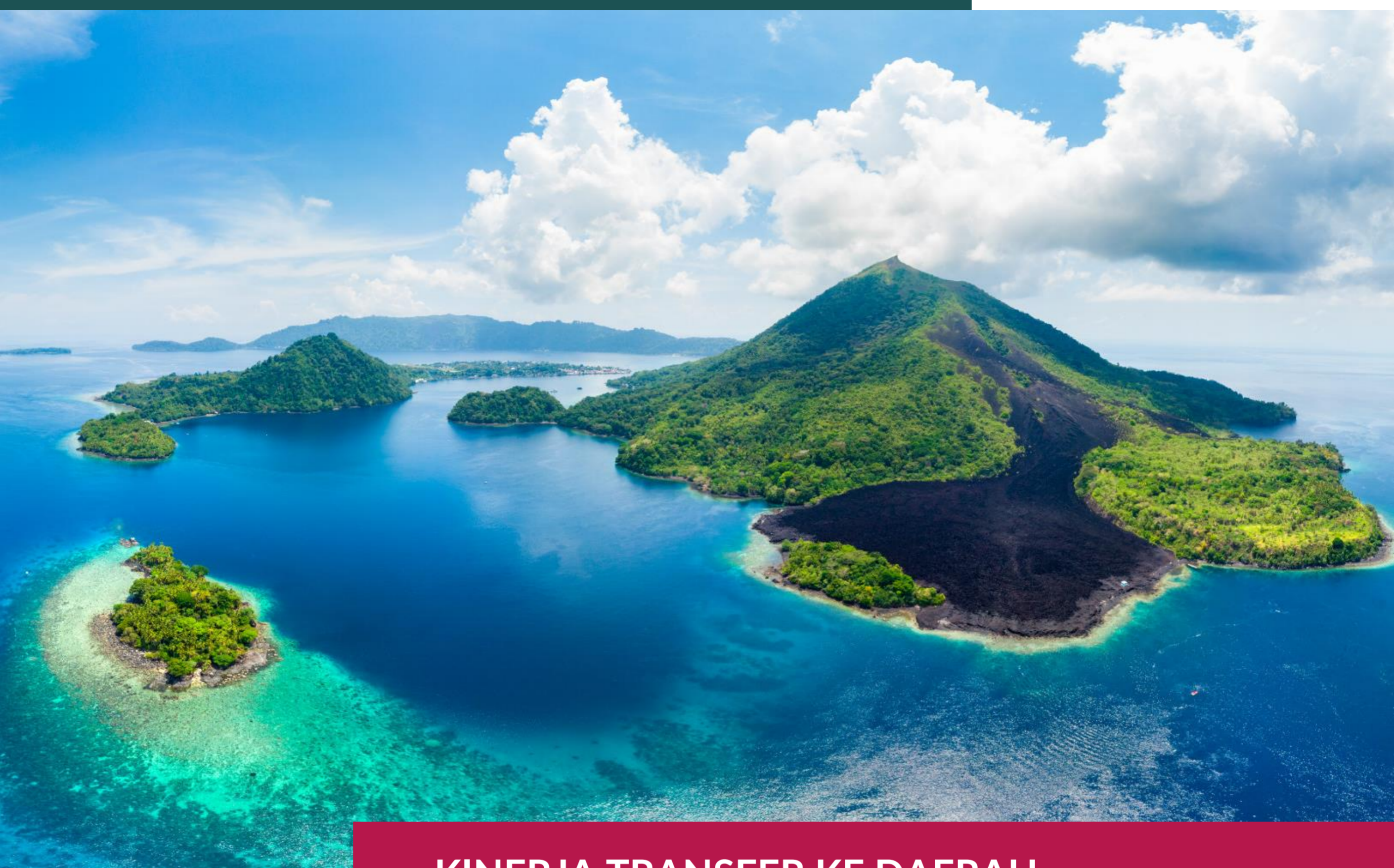
REGION	PROVINSI	SEKTOR	PRIORITAS DIKEMBANGKAN
Jawa	DKI Jakarta dan DI Yogyakarta	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Prioritas Pertama
	DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prioritas Kedua
	Banten	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Prioritas Kedua
	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten	Informasi dan Komunikasi	Prioritas Ketiga
	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten	Real Estate dan Jasa Pendidikan	Prioritas Ketiga
Bali Nusa Tenggara	Bali, NTB, NTT	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Prioritas Kedua
		Administrasi Pemerintahan,	Prioritas Kedua
	Bali, NTB, NTT	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Prioritas Ketiga
	Bali dan NTT	Informasi dan Komunikasi	Prioritas Ketiga
Kalimantan	Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara	Pertambangan dan Penggalian	Prioritas Pertama
	Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Prioritas Pertama
	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	Prioritas Kedua
	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Prioritas Kedua
	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara	Informasi dan Komunikasi	Prioritas Ketiga
	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara	Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	Prioritas Ketiga
Sumatera	Aceh, Sumatera Barat dan Bengkulu	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Prioritas Pertama
	Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Babel, Kepulauan Riau	Pertambangan dan Penggalian	Prioritas Kedua
	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu,	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Prioritas Kedua
	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Prioritas Ketiga
	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau	Jasa Pendidikan	Prioritas Ketiga
Sulawesi	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Prioritas Pertama
	Sulawesi Tengah	Pertambangan dan Penggalian	Prioritas Pertama
	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Prioritas Kedua
	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Prioritas Ketiga
	Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Prioritas Ketiga
Maluku dan Papua	Maluku Utara	Pertambangan dan Penggalian	Prioritas Pertama
	Papua Barat, Papua	Pertambangan dan Penggalian	Prioritas Kedua
	Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat	Administrasi Pemerintahan,	Prioritas Kedua
	Maluku Utara, Maluku, Papua Barat	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Prioritas Ketiga
	Maluku Utara dan Papua Barat	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Prioritas Ketiga

Sumber: BPS, diolah



Simpulan

Prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan di dalam Tabel 6 di atas juga membutuhkan **komitmen** yang besar dari pemda maupun pemerintah pusat. Fasilitasi atas dukungan sektor unggulan, potensial, dan menonjol menjadi katalisator pertumbuhan yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang **memprioritaskan** pada sektor yang potensial akan mendorong sektor-sektor lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung untuk juga tumbuh sehingga lapangan pekerjaan menjadi lebih luas bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan yang semakin besar akan meningkatkan kemungkinan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendapatan yang lebih baik sehingga aktivitas konsumsi dan produksi juga akan terstimulus. Terakhir, yang tidak kalah penting, program **stimulus sektor** yang potensial dan prioritas juga perlu diimbangi dengan **infrastruktur dasar** yang memadai.



KINERJA TRANSFER KE DAERAH

TKD mendukung pendanaan penyelenggaraan urusan daerah serta pembangunan sarana prasarana dan operasionalisasi layanan publik di daerah, antara lain: pembangunan infrastruktur dan dukungan operasional di bidang Pendidikan, kesehatan, irigasi, air minum, pertanian, transportasi, pariwisata, pengembangan perekonomian, lingkungan hidup, dan pembangunan desa.

Grafik 7 - Realisasi TKD dan Persentase terhadap Alokasi



DAU -4,6%	226,570.10 237,542.00	57% 63%	DBH 71,2%	55,649.90 32,501.80	41% 23%	DAK Fisik -7,7%	13,605.50 14,740.80	25% 24%
Otsus -23,3%	7,144.10 9,319.40	41% 58%	Hibah -	874 -	42% 0%	DAK NonFisik 25,0%	93,329.00 74,643.70	72% 58%
Dais 3,1%	1,088.70 1,056	77% 80%	Dandes -2,6%	40,593.50 41,655.80	58% 61%	Insentif Fiskal -4,3%	2,035.20 2,140.50	25% 30%

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Juli 2023 mencapai Rp440,9 Triliun atau tersalur 54,1% dari pagu alokasi TKD 2023. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kinerja TKD secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 6,6% YoY. Peningkatan tersebut terutama karena terdapat kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Masih terdapat beberapa jenis TKD yang kinerja penyalurannya masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama karena pemda sedang menyiapkan syarat penyaluran.

DBH yang telah salur ke pemerintah daerah sebesar Rp55,6 Triliun atau telah salur sebesar 41% dari pagu DBH tahun 2023. Secara nominal, kinerja penyaluran DBH meningkat sebesar 71,2% YoY. Meningkatnya kinerja penyaluran DBH dikarenakan adanya peningkatan pagu alokasi DBH CHT, DBH Minerba, dan DBH Migas pada tahun 2023 ini yang disebabkan naiknya harga komoditas dunia.

DAK Fisik merupakan salah komponen yang mengalami perlambatan realisasi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni turun sebesar 7,7% YoY atau dari Rp14,7 Triliun (2022) menjadi Rp13,6 Triliun (2023) hal ini disebabkan karena pagu pada tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Realisasi DAK Nonfisik per 31 Juli 2023 sebesar Rp93,33 Triliun atau 71,63% dari pagu alokasi 2023, realisasi tersebut naik Rp18,68 Triliun (25,03%) jika dibandingkan dengan realisasi DAK Nonfisik tahun 2022 pada tanggal yang sama. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur oleh satuan pendidikan sehingga Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan sudah hampir tersalur seluruhnya.

Penurunan kinerja penyaluran dana transfer ke daerah juga terjadi pada Dana Desa yang sedikit lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar -2,6% YoY. Dana Desa yang telah salur sampai dengan 31 Juli 2023 sebesar Rp40,6 Triliun atau telah salur sebesar 58% dari pagu Dana Desa. Penurunan ini antara lain disebabkan karena anggaran BLT Desa turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, anggaran BLT Desa dipatok min 40%, sedangkan di tahun 2023 maksimal 25%. Persyaratan salur utk BLT relatif lebih mudah dibandingkan dngan nonBLT.

Penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 3,1% YoY. Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah salur sebesar Rp 1,08 Triliun atau telah salur sebesar 77% dari pagu Dana Keistimewaan DIY. Peningkatan kinerja penyaluran yang sangat tinggi disebabkan adanya percepatan penyampaian syarat salur tahap II berupa penyampaian laporan realisasi penyerapan dan laporan pencapaian kinerja Tahap I.



Kinerja penyaluran insentif fiskal mengalami penurunan yakni sebesar -4,3% YoY. Insentif fiskal yang telah salur sampai dengan 31 Juli 2023 sebesar Rp2,0 Triliun atau telah salur sebesar 25,0%. Hal ini antara lain dikarenakan jumlah pemda yg menyampaikan laporan realisasi sebagai syarat salur bulan Juli 2023 jauh lebih sedikit (5 Pemda) dibandingkan tahun lalu (25 pemda) pada periode yg sama.

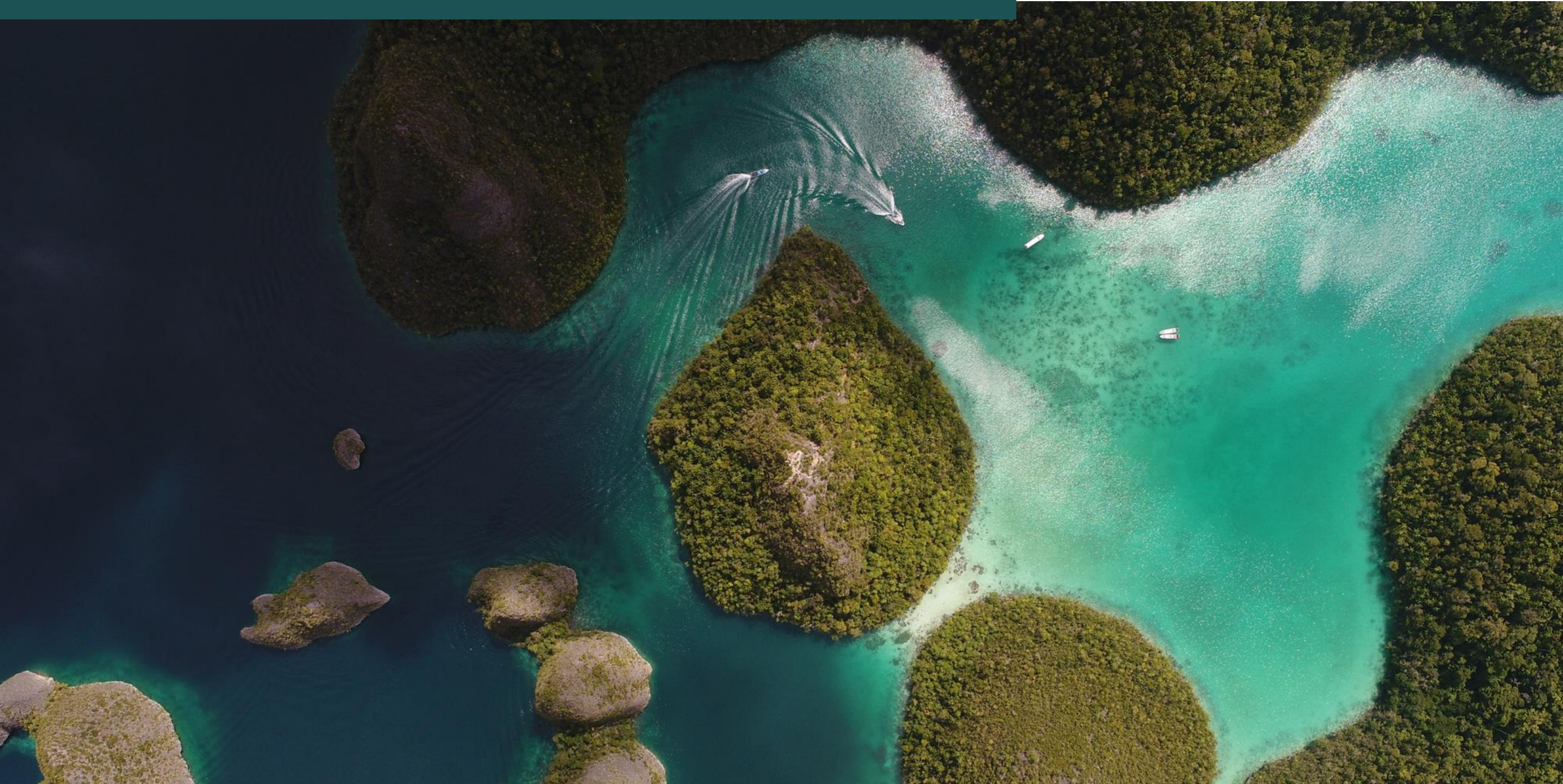
Sejak tahun 2023, hibah daerah sebagai bagian dalam alokasi TKD. Hibah daerah yang telah salur sampai dengan Juli 2023 sebesar Rp874,3 Miliar yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang diterushibahkan sebesar Rp812,1 Miliar dan hibah luar negeri yang diterushibahkan sebesar Rp62,2 Miliar. Adapun komponen Hibah ke Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sampai dengan 31 Juli 2023 belum mencatatkan adanya realisasi dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan dan menunggu hasil reuiu APIP terlebih dahulu.

Di sisi lain, kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) secara nominal mengalami kontraksi sebesar -4,6%. DAU yang telah salur sampai dengan 31 Juli 2023 sebesar Rp226,5 Triliun atau 57% dari pagu DAU. Belum tersalurnya DAU karena Pemda sedang menyiapkan syarat salur tahap II untuk DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan batas waktu penyampaian syarat salur paling lambat tanggal 31 Agustus 2023

Turunnya kinerja penyaluran DAU diikuti juga dengan turunnya kinerja penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sampai dengan 31 Juli 2023, penyaluran Dana Otsus sebesar 41%.

Dalam periode ini telah disalurkan sebesar Rp7,1 Triliun atau 41% dari pagu Dana Otonomi Khusus. Turunnya kinerja salur Dana Otonomi Khusus disebabkan oleh belum seluruhnya provinsi-provinsi di Papua telah salur Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastrukturnya. Dana-dana tersebut belum salur dikarenakan beberapa pemerintah daerah di Provinsi Papua belum menyampaikan hasil validasi atas integrasi rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi/kabupaten/kota.





Walaupun dapat dikatakan saat ini kita telah melewati masa pandemic covid-19 (*post pandemic*) kondisi geopolitik dan volatilitas harga komoditas menyebabkan tekanan inflasi global masih terbilang tinggi dan perlu terus diwaspadai. Kondisi tersebut, mendorong banyak negara untuk menaikkan suku bunga yang berpotensi meningkatkan *cost of fund* dan lebih ketatnya likuiditas global. Di tengah kondisi tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) terus dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk meredam dampak negatif yang ditimbulkan. Namun, agar lebih optimal APBN perlu bekerja bersama dengan APBD. Sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memitigasi dampak dari ketidakpastian global khususnya terkait dengan penanganan inflasi.

Meskipun Indonesia memiliki kinerja ekonomi yang relatif baik, stabil dan perform pada saat dunia mengalami goncangan yang luar biasa, baik dari sisi inflasi, pertumbuhan dan kemudian dihantam dengan suku bunga tinggi, Indonesia masih bisa menjaga tingkat inflasi yang terkendali.

Keberhasilan menurunkan tingkat inflasi tersebut tidak terlepas dari upaya berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Indonesia yang jumlah populasinya sangat besar dapat mengendalikan inflasi tanpa mengandalkan kebijakan menaikkan suku bunga yang naik terlalu ekstrem merupakan suatu prestasi yang perlu terus dipertahankan.

Untuk memberikan apresiasi bagi daerah yang berkinerja baik dalam mengendalikan inflasi, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada TA 2023, Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.

kinerja pengendalian inflasi dialokasikan dalam tiga periode agar peningkatan kinerja dapat terus dimonitor, kinerja dari pemda dapat langsung di apresiasi, dan penggunaannya pun bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode berikutnya. Insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk penanganan inflasi tersebut akan diberikan kepada 3 Provinsi, 6 Kota dan 24 Kabupaten terbaik.

Terdapat 4 indikator penilaian kinerja inflasi yaitu:

1

Peringkat Inflasi

Peringkat daerah berdasarkan Indeks Perkembangan Harga untuk kab/kota dan Inflasi gabungan untuk provinsi yang bersumber dari BPS

2

Dukungan Belanja Penanganan Inflasi

Realisasi belanja penandaan inflasi dibanding total belanja APBD yang bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kemenkeu

3

Laporan Pengendalian Inflasi

Merupakan tingkat kepatuhan penyampaian laporan harian pengendalian inflasi yang disampaikan kepada Kemendagri

4

Upaya Pengendalian Inflasi

Pelaksanaan 9 upaya pengendalian inflasi versi Kemendagri

Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk pemda yang berkinerja baik mengendalikan inflasi diharapkan dapat secara optimal dapat digunakan pemda untuk kegiatan yang manfaatnya dapat diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi. Sebagai catatan bahwa alokasi insentif fiskal tersebut **tidak dapat digunakan** untuk mendanai gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium dan perjalanan dinas. Kebijakan insentif fiskal ini, merupakan salah satu langkah mitigasi dalam menghadapi ketidakpastian global. Pemantauan dan evaluasi atas risiko kenaikan inflasi perlu terus dilakukan dan sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat dalam implementasi program/kebijakan Pemerintah baik di level pusat maupun di daerah.



KINERJA FISKAL DAERAH



Kinerja Pendapatan Daerah

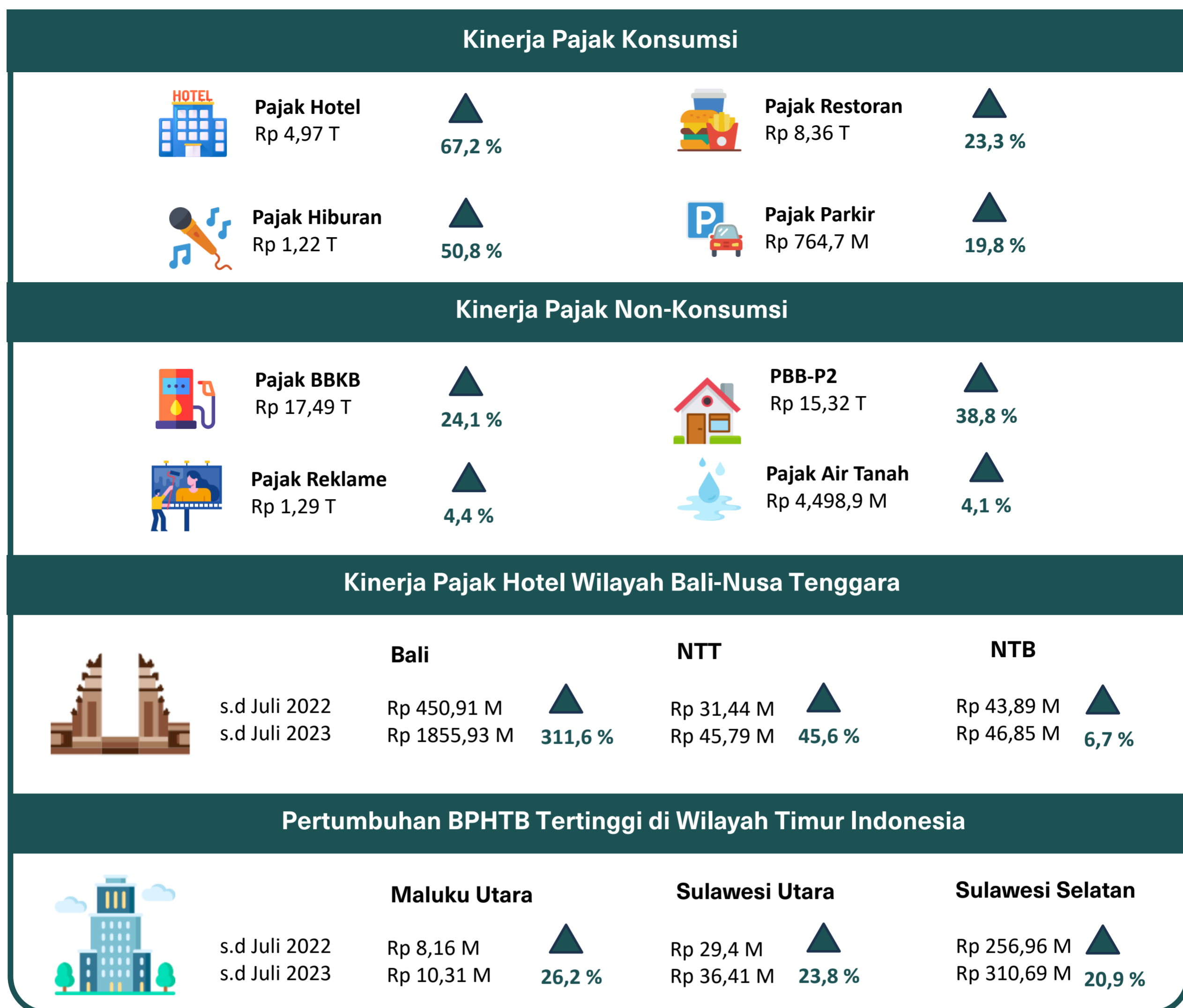
Sampai dengan akhir Juli 2023, kinerja pendapatan daerah sebesar Rp587,0 triliun atau tumbuh 1,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan kinerja pendapatan daerah utamanya ditopang oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi 5,8% (y.o.y). Secara proporsi, didominasi oleh Pajak Daerah (74,6%) diikuti Lain-lain PAD yang Sah (17,6%) sementara porsi Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah hanya masing-masing 5, 3% dan 2,4%.

Per jenis PAD, Pajak Daerah telah mencapai sebesar Rp132,40 Triliun atau tumbuh 9,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Retribusi Daerah sampai dengan Juli 2023 juga turut tumbuh, mencapai Rp4,35 Triliun atau naik 5,0% secara y.o.y. Meskipun sedikit, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh 0,4% dibandingkan tahun sebelumnya atau mencapai Rp8,47 Triliun. Sementara itu, Lain-lain PAD yang sah sampai dengan bulan Juli 2023 baru mencapai Rp31,22 Triliun masih berkontraksi sebesar 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara lebih spesifik, kinerja pajak daerah s.d Juli 2023 menunjukkan semakin tingginya konsumsi masyarakat ini dicerminkan melalui adanya peningkatan realisasi pajak yang bersifat konsumtif seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir yang menunjukkan semakin bergeliatnya **sektor pariwisata** pada periode ini.

Selaras dengan tumbuhnya perekonomian regional Bali – Nusra pada Q2 2023 dengan sumber pertumbuhan utama penyediaan akomodasi dan makan minum. Peningkatan realisasi pajak bersifat konsumtif (y.o.y) paling signifikan terjadi di wilayah Bali-Nusra sebagai wilayah dengan destinasi wisata yang banyak dituju oleh masyarakat. Di wilayah Bali, peningkatan pajak hotel mencapai Rp1.85 triliun atau lebih tinggi 311,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Wilayah Nusa Tenggara Barat realisasi pajak hotel mencapai Rp45,79 Miliar, tumbuh 45,6% dibandingkan tahun lalu. Pada wilayah Nusa Tenggara Timur, realisasi pajak hotel sudah mencapai Rp46,86 Miliar, tumbuh 6,7% y.o.y.

Grafik 8 – Kinerja Pendapatan Daerah



Data per Juli 2023 (y.o.y)

Selain pajak yang terkait aktivitas konsumsi, beberapa jenis pajak lainnya juga turut tumbuh tinggi dibandingkan tahun lalu antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (38,8%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (24,1%), Pajak Reklame (4,4%) dan Pajak Air Tanah (4,1%).

Sementara Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan *proxy* dari geliat **investasi daerah** menunjukkan bahwa terjadi pergeseran investasi ke wilayah timur Indonesia. Sampai dengan Juli 2023, pertumbuhan BPHTB tertinggi terjadi di wilayah Maluku yang tumbuh 26,2%, Sulawesi Tenggara tumbuh 23,8% dan Sulawesi Selatan tumbuh 20,9%.

Selain Pajak Daerah, pertumbuhan Retribusi Daerah sd Juli 2023 juga tumbuh yang ditopang oleh peningkatan hasil retribusi perizinan tertentu dan retribusi jasa usaha yang masing-masing tumbuh 54% dan 9%. Sementara retribusi jasa umum masih berkontraksi 12% dibandingkan dengan tahun lalu. Pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mencatat pertumbuhan sebesar 0,4% yang disebabkan oleh pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal milik swasta (695,8%) dan bagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal pada BUMD (6,3%). Lain-lain PAD yang sah masih berkontraksi 7,3% dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan pendapatan BLUD (-11,1%) dan penurunan jasa giro (-13,2%).

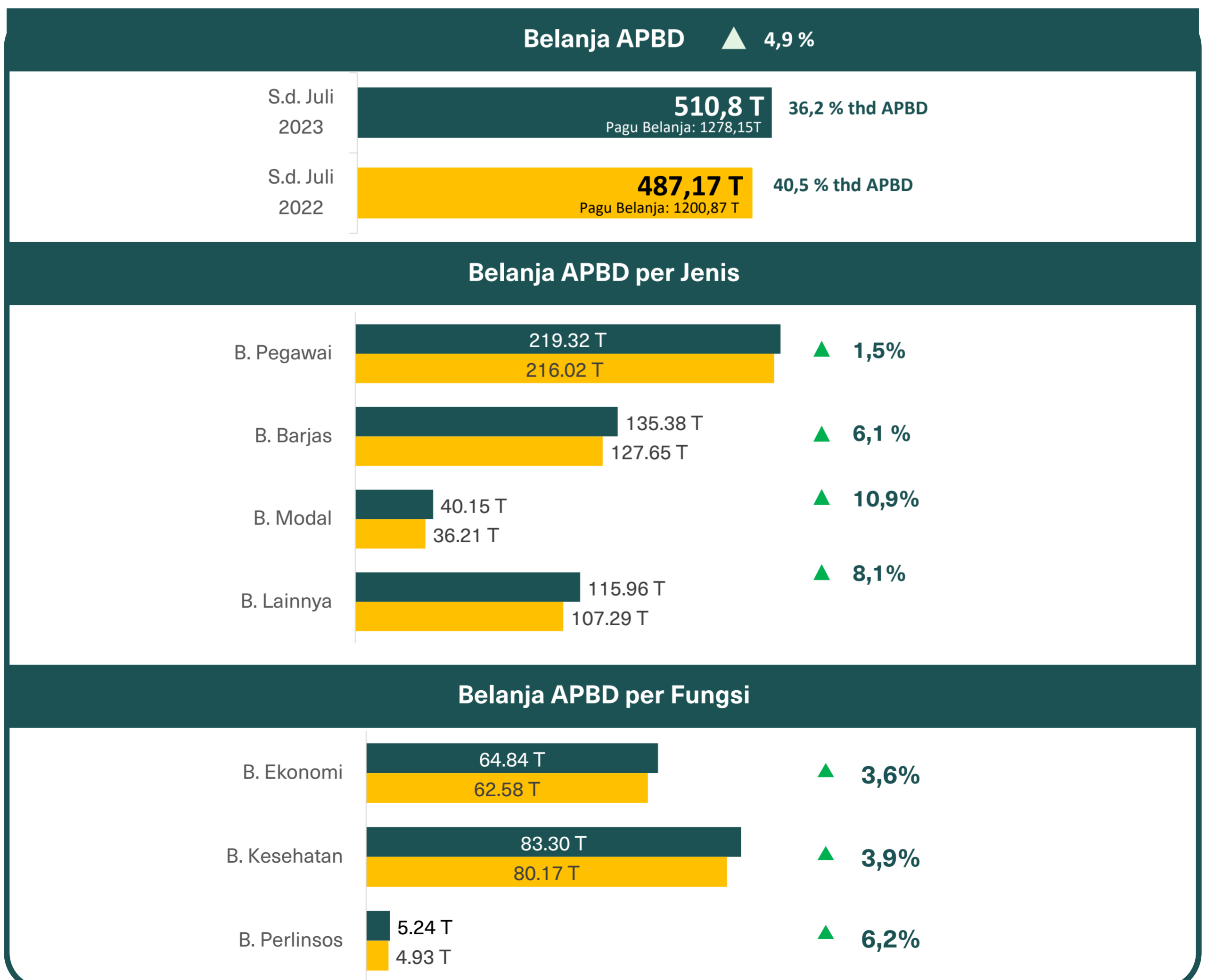
Kinerja Belanja Daerah

Dari sisi Belanja Daerah, realisasi sd Juli 2023 juga menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Serapan belanja daerah sudah mencapai Rp510,8 Triliun atau tumbuh 4,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun apabila dibandingkan dengan pagu dalam APBD 2023, realisasi belanja daerah s.d Juli 2023 baru sebesar 39,96%. Meskipun sudah meningkat secara year on year, kinerja serapan belanja daerah perlu terus di dorong agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

Kinerja serapan yang baik ini ini dikontribusikan dari seluruh jenis belanja. Belanja pegawai tumbuh 1,5% yang disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Belanja Barang dan Jasa tumbuh 6,1% yang disebabkan kenaikan belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjadiin dan belanja jasa kepada pihak ketiga. Belanja Modal tumbuh 10,9%, karena peningkatan belanja modal jalan dan jembatan, bangunan gedung, bangunan air, alat kantor dan komputer. Belanja Lainnya tumbuh 8,1%, karena peningkatan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, belanja bagi hasil pajak daerah kepada kab/kota dan desa, serta belanja hibah kepada badan/Lembaga/ormas berbadan hukum.

Berbagai peningkatan tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan realisasi belanja fungsi ekonomi, fungsi perlindungan sosial (perlinsos) dan fungsi fungsi kesehatan yang tumbuh dibandingkan tahun lalu (y.o.y) masing-masing 3,6%, 3,9%, dan 6,2%. Pertumbuhan kinerja per fungsi ini menunjukkan dukungan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan akses layanan kesehatan dan dukungan pemberian bantuan kepada masyarakat.

Grafik 9 – Kinerja Belanja Daerah s.d Juli 2023

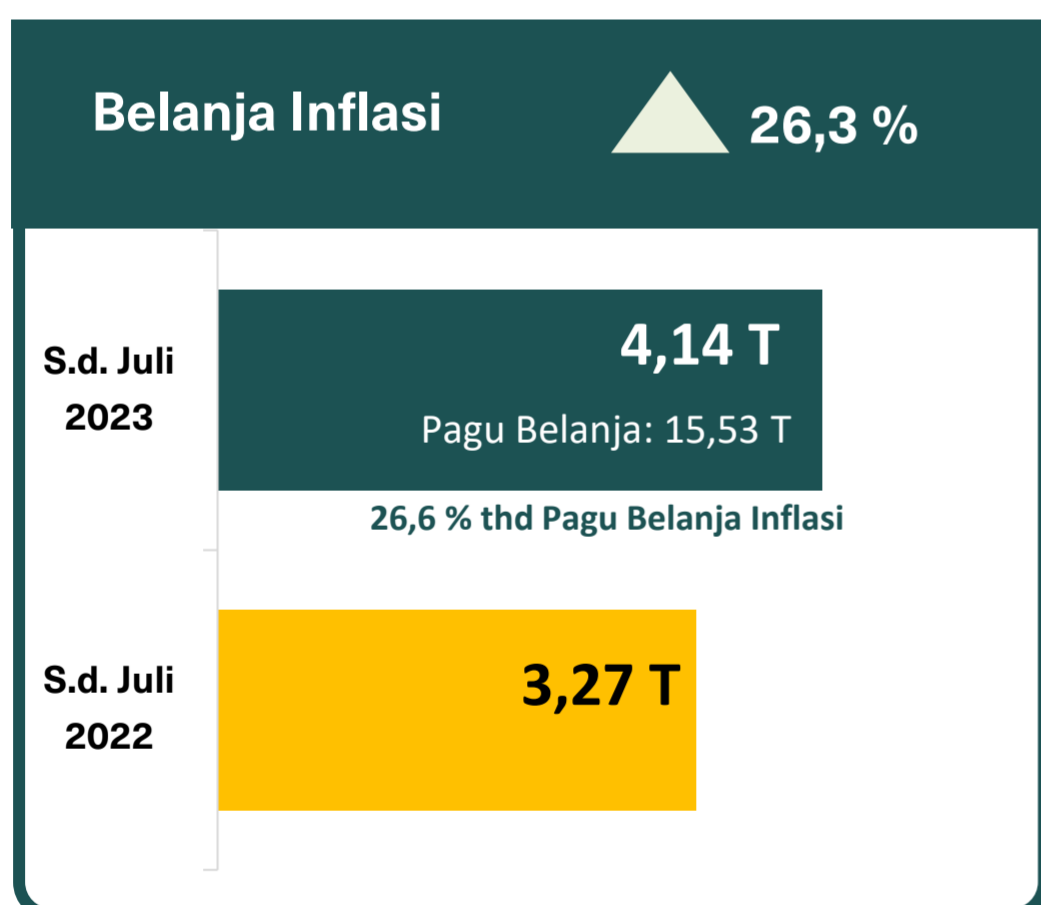




Dapat dikatakan, dengan tingginya mobilitas masyarakat dan membaiknya perekonomian Indonesia telah memasuki masa *post pandemic*. Namun, berbagai tantangan masih terus membayangi khususnya tahun 2024 mendatang diperkirakan masih terdapat risiko global yang harus diwaspadai yaitu ekonomi global masih lemah, suku bunga masih relatif tinggi, geopolitik menimbulkan disrupsi dan tekanan inflasi, dampak perubahan iklim semakin nyata. Tidak hanya pelaksanaan APBN dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global maupun domestik. Dengan kondisi global dan domestik yang dinamis, perlu diwaspadai adanya tekanan terhadap APBD. Untuk itu, berbagai instrumen yang ada dalam APBN dan APBD harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi dampaknya pada perekonomian domestik.

Harga komoditas pangan antara lain cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah kerap berfluktuasi akibat curah hujan tinggi di wilayah sentra sehingga menimbulkan gagal panen dan terganggunya distribusi. Di sisi lain, harga minyak goreng juga mengalami fluktuasi seiring volatilitas harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Fluktuasi harga pangan juga dapat terjadi karena restriksi ekspor di beberapa negara produsen pangan, untuk itu pergerakannya harus terus diwaspadai dan dimitigasi risiko yang akan muncul sehingga inflasi yang ada dapat terkendali.

Grafik 10 – Belanja Inflasi

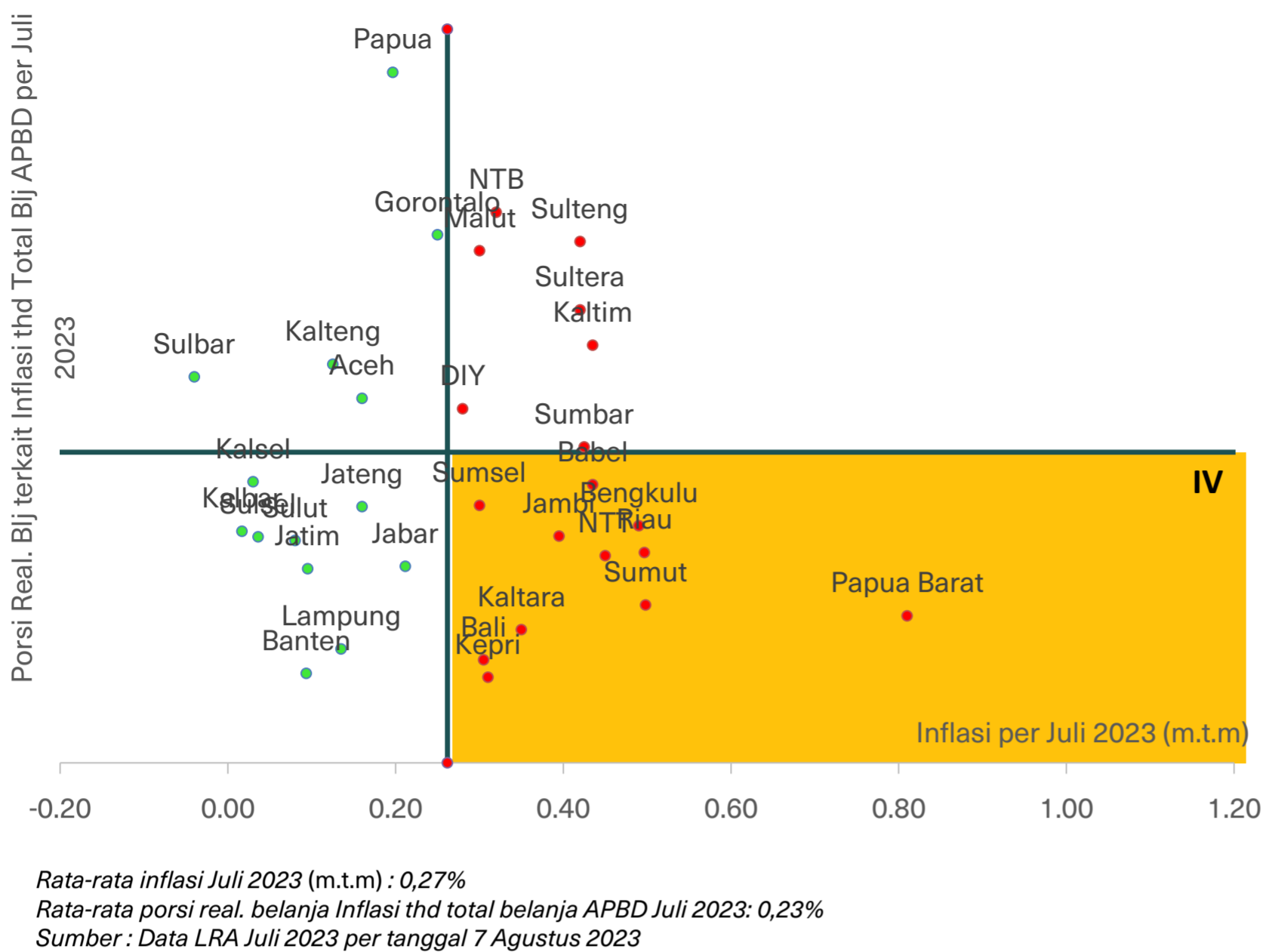


Inflasi tinggi akan menekan belanja masyarakat dan berpengaruh terhadap komponen terbesar pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga. Masyarakat berpenghasilan menengah relatif masih bisa bertahan di tengah kenaikan harga pangan lantaran memiliki penghasilan tetap. Hal ini beda dengan masyarakat berpenghasilan rendah yang mayoritas tak berpenghasilan tetap. Penghasilan mereka lebih rentan tergerus oleh kenaikan harga pangan pokok karena belanja utama mereka adalah pangan pokok.

Pangan sangat penting bagi masyarakat sehingga APBD perlu terus mengantisipasi dan memitigasi risiko dari kenaikan harga kelompok pangan bergejolak melalui berbagai kebijakan untuk menjamin kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat yang merupakan salah satu upaya penanganan inflasi.

Komitmen pemerintah daerah untuk penanganan inflasi tergambar dalam pengalokasian belanja terkait inflasi dalam APBD nya. Pada tahun 2023, total anggaran belanja terkait inflasi sebesar Rp15,53 Triliun. Adapun kinerja realisasi belanja inflasi s.d Juli 2023 adalah sebesar Rp4,14 Triliun atau telah terserap 26,6% dari pagu. Kinerja serapan belanja terkait inflasi ini pun tumbuh 26,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja inflasi tersebut sejalan dengan terkendalinya inflasi daerah per Juli 2023 yang rata-rata hanya 0,27% (month to month).

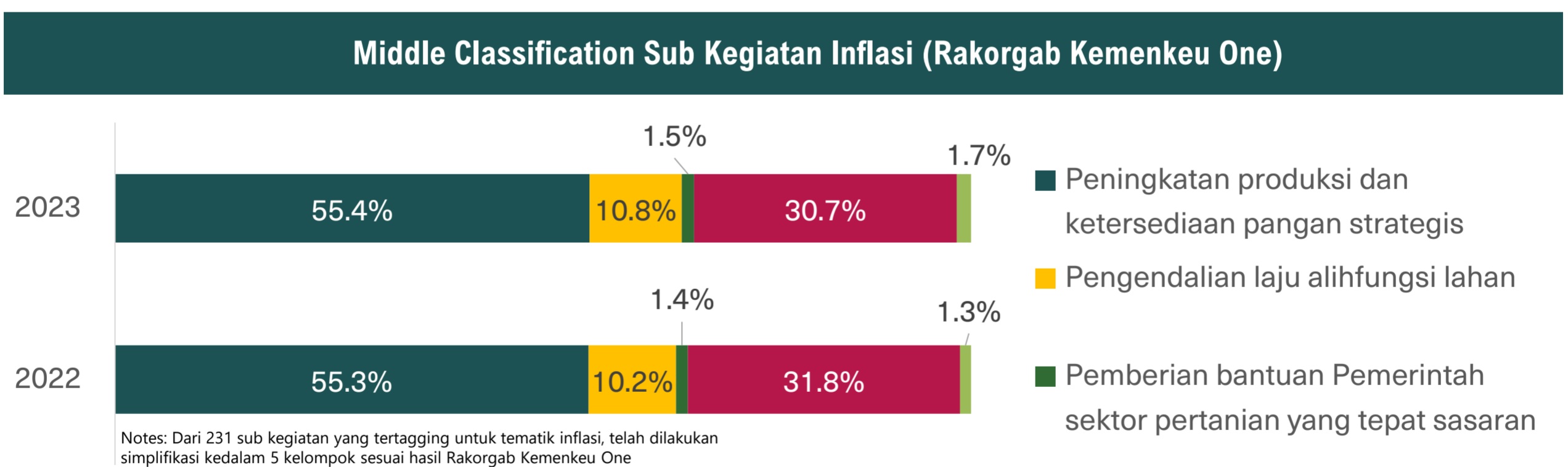
Grafik 11 – Analisis Kuadran Inflasi



Namun, jika dilihat lebih dalam per wilayah provinsi masih terdapat beberapa daerah dengan inflasi diatas rata-rata yang selaras dengan kinerja serapan belanja terkait inflasi yang rendah/dibawah rata-rata (kuadran IV). Wilayah provinsi tersebut antara lain adalah Papua Barat, Sumatera Utara, Riau dan Bengkulu (Grafik. 11). Daerah-daerah pada kuadran IV tersebut perlu untuk mempercepat kinerja serapan belanja inflasi nya dengan harapan akan menurunkan tingkat inflasi pada wilayah yang bersangkutan.

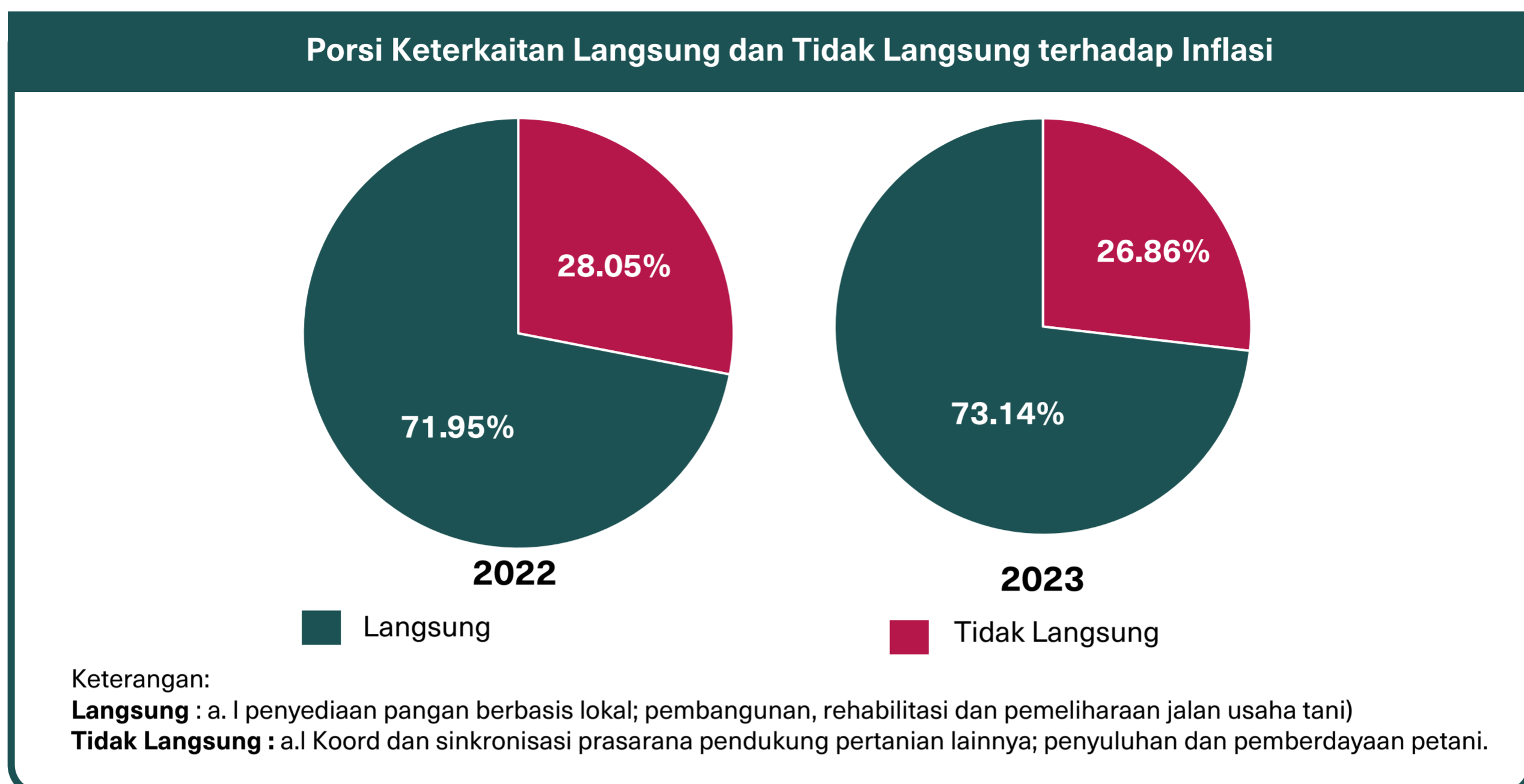
Dalam mengidentifikasi belanja APBD yang terkait dengan inflasi, DJPK Kemenkeu telah mengelompokkan 231 subkegiatan menjadi tagging tematik inflasi. Namun terdapat kebutuhan untuk Penajaman Monev Capaian Tematik Prioritas Nasional (Investasi, Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Inflasi) mengingat hasil tagging dari subkegiatan tematik inflasi dalam APBD masih terlalu luas (231 subkegiatan). Untuk itu, dilakukan pengklasifikasian subkegiatan belanja inflasi ke dalam 5 tema besar merupakan hasil *subject matter expert* Kemenkeu dalam pelaksanaan Rakorgab unit Es. I Kemenkeu yang berfungsi sebagai *guidance* bersama dalam penentuan tagging sehingga antar unit eselon I Kemenkeu dalam mengidentifikasi belanja baik pusat maupun daerah terkait dengan inflasi memiliki mekanisme identifikasi yang sama.

Grafik 12 – Middle Classification Sub Kegiatan Inflasi



Dengan pengelompokkan dari 231 subkegiatan belanja daerah terkait inflasi menjadi 5 tema besar (*middle classification*). Diketahui bahwa sd Juli 2023, porsi terbesar realisasi terkait inflasi ada dalam tema peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis (55,4%), diikuti tema penguatan tata Kelola logistik nasional sebagai porsi terbesar kedua (30,7%), selanjutnya tema pengendalian laju alih fungsi lahan (10,8%), pengawasan harga dan operasi pasar (1,7%) dan terkecil pemberian bantuan pemerintah sektor pertanian yang tepat sasaran (1,5%). Tema peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis dan tema penguatan tata kelola logistik nasional diyakini mampu mengendalikan inflasi di daerah. Maka selaras dengan besarnya porsi kedua tema tersebut, inflasi di daerah pada Juli 2023 juga dalam kondisi yang relatif terkendali.

Grafik 13 – Porsi Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung



Selanjutnya, kiranya perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut apakah realisasi belanja dimaksud memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung terhadap penanganan inflasi di Masyarakat. Hal ini perlu sebagai *tools* untuk konfirmasi dan memastikan jangan sampai penanganan inflasi yang seharusnya diberikan kepada hal-hal yang langsung terkait ketahanan pangan (a.I penyediaan pangan berbasis lokal; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani) malah digunakan Sebagian besarnya dalam hal-hal yang bersifat tidak langsung terkait ketahanan pangan (a.I koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya; penyuluhan dan pemberdayaan petani).

Selaras dengan kinerja inflasi daerah yang terkendali, hasil analisis keterkaitan langsung dan tidak langsung pada realisasi belanja terkait inflasi pada Juli 2023 menunjukkan bahwa Sebagian besar realisasi belanja terkait inflasi digunakan untuk subkegiatan yang langsung terkait (73,14%) sementara porsi keterkaitan tidak langsung sebesar (26,86%). Apabila disandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terdapat pertumbuhan porsi realisasi belanja inflasi sebesar 1.19% yang langsung terkait dengan penanganan inflasi. Selanjutnya, untuk memastikan terdapat mitigasi risiko dalam APBD terkait inflasi. Kemenkeu dan stakeholders terkait lainnya (TPIP, TPID) terus mendorong pemda mengendalikan inflasi melalui Insentif Fiskal tahun berjalan tahun 2023. Dengan mitigasi risiko inflasi yang handal, pemda melalui APBD nya dapat bekerja bersama dengan APBN dalam menjaga stabilisasi harga, melindungi daya beli serta menjaga momentum pemulihan ekonomi.



PERKEMBANGAN REFORMASI STRUKTURAL INDONESIA

Reformasi struktural merupakan agenda yang mulai digulirkan sejak awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di mana saat ini sudah memasuki tahun ke 10. Dengan reformasi struktural, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan investasi, dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung oleh perbaikan regulasi.

Reformasi struktural tidak dapat berdiri sendiri dan akan lebih kokoh bila di saat yang bersamaan ditopang juga dengan reformasi fiskal. Reformasi fiskal, yang instrumen utamanya adalah APBN, perlu dilakukan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan transparan. Secara umum, reformasi fiskal diarahkan untuk optimalisasi pendapatan, perbaikan kualitas belanja, dan pembiayaan kreatif.

Salah satu bentuk reformasi fiskal yang telah dilakukan di DJPK adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) beserta peraturan turunannya. Dengan ditetapkannya UU HKPD, diharapkan dapat memperbaiki kualitas hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan cara menurunkan ketimpangan antar wilayah, optimalisasi kualitas belanja, penguatan *tax ratio*, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Namun demikian **berhasil tidaknya reformasi struktural** di Indonesia juga ditentukan oleh keberhasilan reformasi struktural yang dilakukan oleh daerah. Oleh karena itu, progres reformasi struktural pemda juga perlu dilakukan pemantauan. Dengan pemantauan ini diharapkan kita bisa melihat keunggulan kompetitif suatu daerah terhadap daerah yang lainnya.

Dalam menyusun nilai reformasi struktural tersebut, tajuk ini menggunakan metode yang dibangun World Bank (2020) untuk kemudian dilakukan modifikasi untuk konteks pemerintah daerah di Indonesia. Faktor penentu keberhasilan reformasi struktural dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

- a. *Macroeconomics* (kondisi makroekonomi yang stabil), dinilai dari variabel tingkat inflasi daerah. Menggunakan data inflasi tahun 2022 yang bersumber dari BPS.
- b. *Basic Governance*, yang direpresentasikan dari Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Menteri PANRB, terakhir menggunakan data tahun 2021.
- c. *Infrastructure*, dari indeks pelayanan publik bidang infrastruktur. Indeks ini disusun oleh DJPK dengan menggunakan variabel antara lain kondisi jalan mantap, kualitas internet, cakupan listrik, dll. Indeks ini menggunakan data terakhir yaitu tahun 2023.

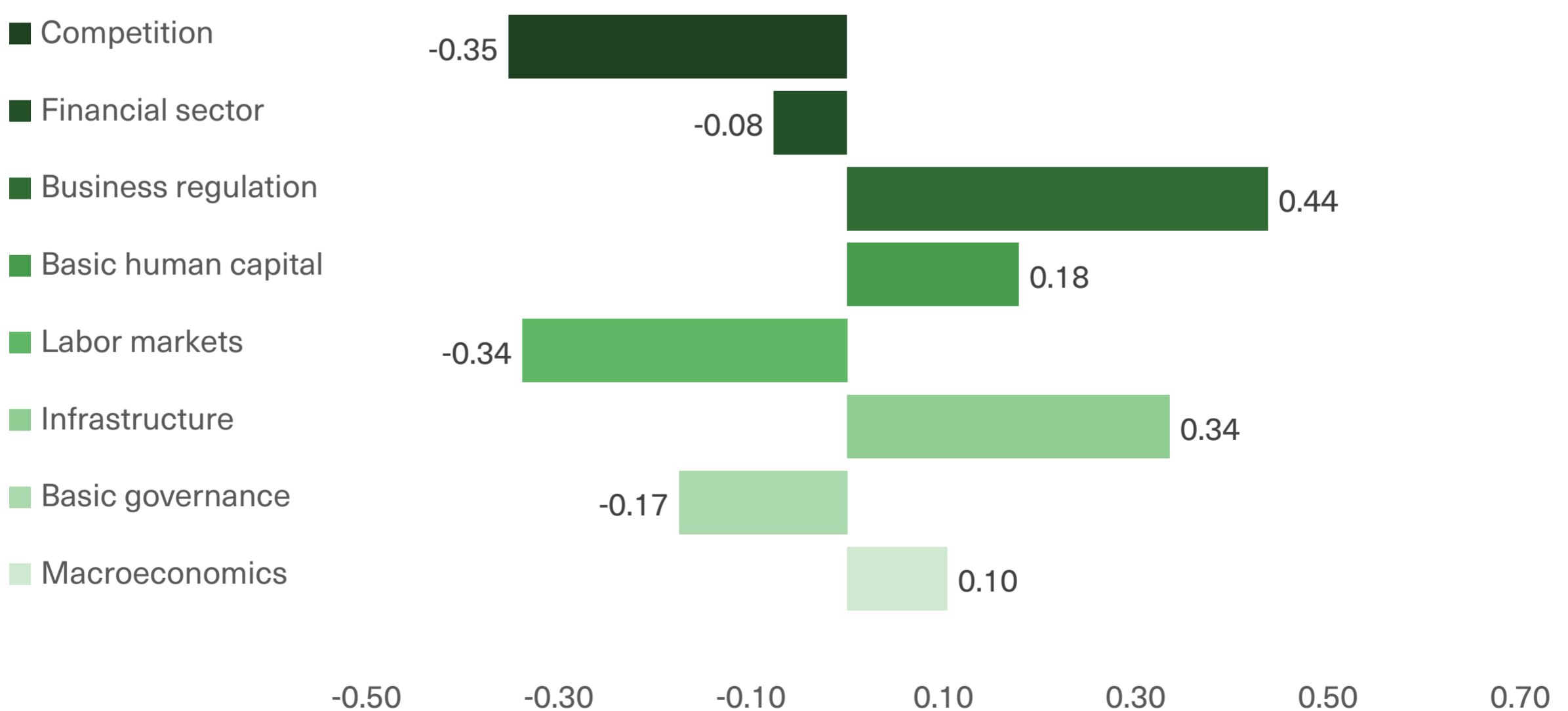
- d. *Basic Human Capital*, yang digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel ini bersumber dari BPS dan menggunakan data terakhir, yaitu IPM tahun 2022.
- e. *Business Regulation*, yang digambarkan dengan indeks kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bersumber dari BKPM dan menggunakan data tahun 2022.
- f. *Labor Markets*, merupakan gambaran fleksibilitas pengaturan di bidang ketenagakerjaan, dapat digambarkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang bersumber dari BPS dan terakhir menggunakan data tahun 2022.
- g. *Financial Sector*, yang digambarkan oleh pinjaman yang diberikan kepada masyarakat untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi serta pemberian kredit kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Data ini bersumber dari Bank Indonesia dengan menggunakan data tahun 2022.
- h. *Competition*, yang digambarkan dengan Indeks Daya Saing Daerah. Indeks ini bersumber dari BRIN yang dapat menggambarkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta faktor-faktor pendorongnya di antaranya adalah aspek infrastruktur. Indeks ini menggunakan data tahun 2022.

Mekanisme yang lazim dan mudah digunakan dalam menilai reformasi struktural adalah dengan melihat *z-score* dari suatu pemda. *z-score* menggambarkan penyimpangan data dari nilai rata-rata yang telah diukur dengan standar deviasinya. *Z-score* yang positif menggambarkan nilai yang lebih tinggi dari rata-rata, demikian pula sebaliknya, *z-score* yang negatif menggambarkan nilai yang lebih rendah dari rata-rata. Dalam kajian ini, kami akan menggunakan analisis *z-score* yang akan diterapkan di tiap region untuk melihat aspek mana yang menjadi unggulan di setiap daerah dan aspek mana yang masih dapat ditingkatkan dan perlu menjadi perhatian baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.

HASIL ANALISIS Z-SCORE

REGION SUMATERA

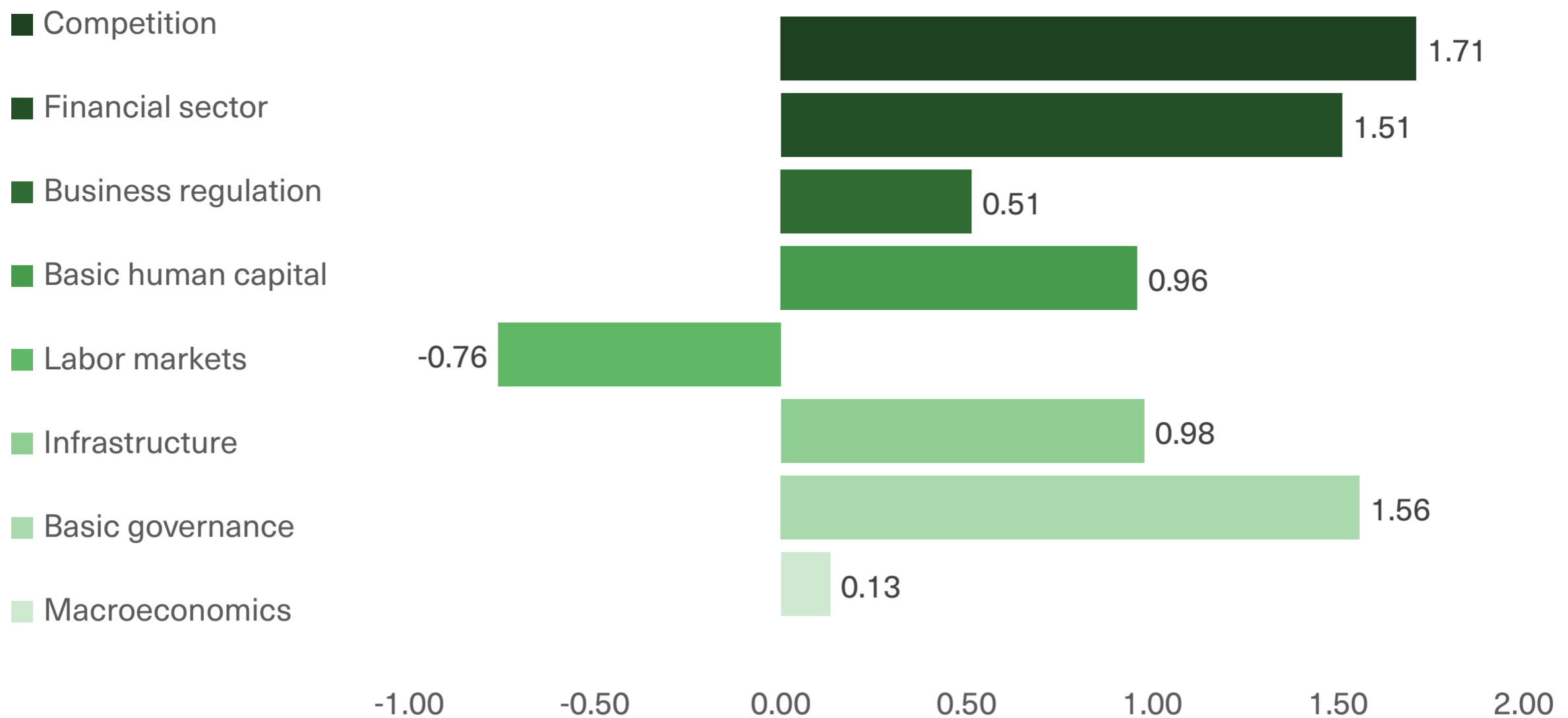
Grafik 21 – Z-score Region Sumatera



Pada region Sumatera, aspek *business regulation*, *infrastructure* dan *human capital* menunjukkan *z-score* yang cukup tinggi dibanding rata-rata nasional. Sementara itu, aspek *finansial* menunjukkan nilai yang sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional. Adapun *competition* dan *labor markets* memiliki simpangan yang paling rendah di antara aspek lain di region Sumatera.

REGION JAWA

Grafik 22 – Z-score Region Jawa

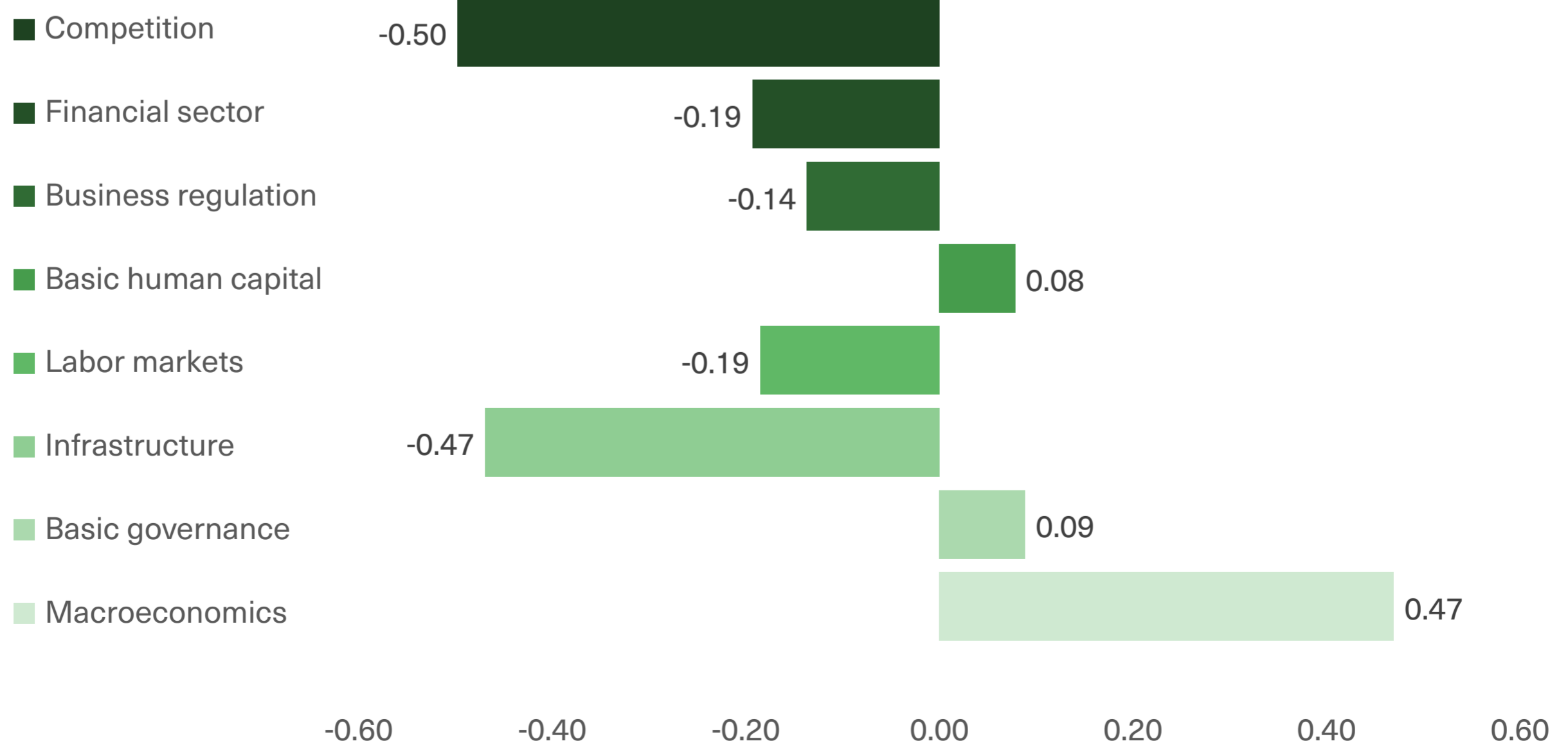


Sampai saat ini, region Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPS mencatatkan bahwa pada triwulan I 2023, Jawa memberikan kontribusi sebesar 57,17% pada pertumbuhan ekonomi nasional. Fakta ini sejalan dengan hasil perhitungan *z-score* pada region Jawa, di mana hampir semua sektor memiliki nilai yang positif, yaitu lebih tinggi dari rata-rata nasional. Aspek *competitiveness* dan *basic governance* menunjukkan simpangan positif yang cukup besar. Untuk kedua aspek ini, provinsi-provinsi di region Jawa memang terlihat mendominasi, bahkan DKI Jakarta memiliki Indeks Daya Saing Daerah yang tertinggi dan Provinsi DIY memiliki Indeks Reformasi Birokrasi tertinggi untuk tingkat nasional. Seiring dengan posisi Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi, politik, dan sosial, maka kebutuhan atas pelayanan publik pun meningkat, sehingga pemerintah daerah terdorong untuk memprioritaskan upaya reformasi birokrasi sebagai bagian dari inisiatif untuk memberikan layanan publik yang lebih baik.

Satu-satunya aspek yang memiliki simpangan lebih rendah di Jawa dari rata-rata nasional adalah aspek *labor markets*. Padatnya penduduk dengan SDM yang berkualitas, menciptakan kompetisi yang ketat di antara angkatan kerja. Terlebih pesatnya kemajuan teknologi yang menekankan proses otomatisasi, berdampak pada pengurangan kebutuhan akan tenaga kerja di beberapa sektor industri.

REGION KALIMANTAN

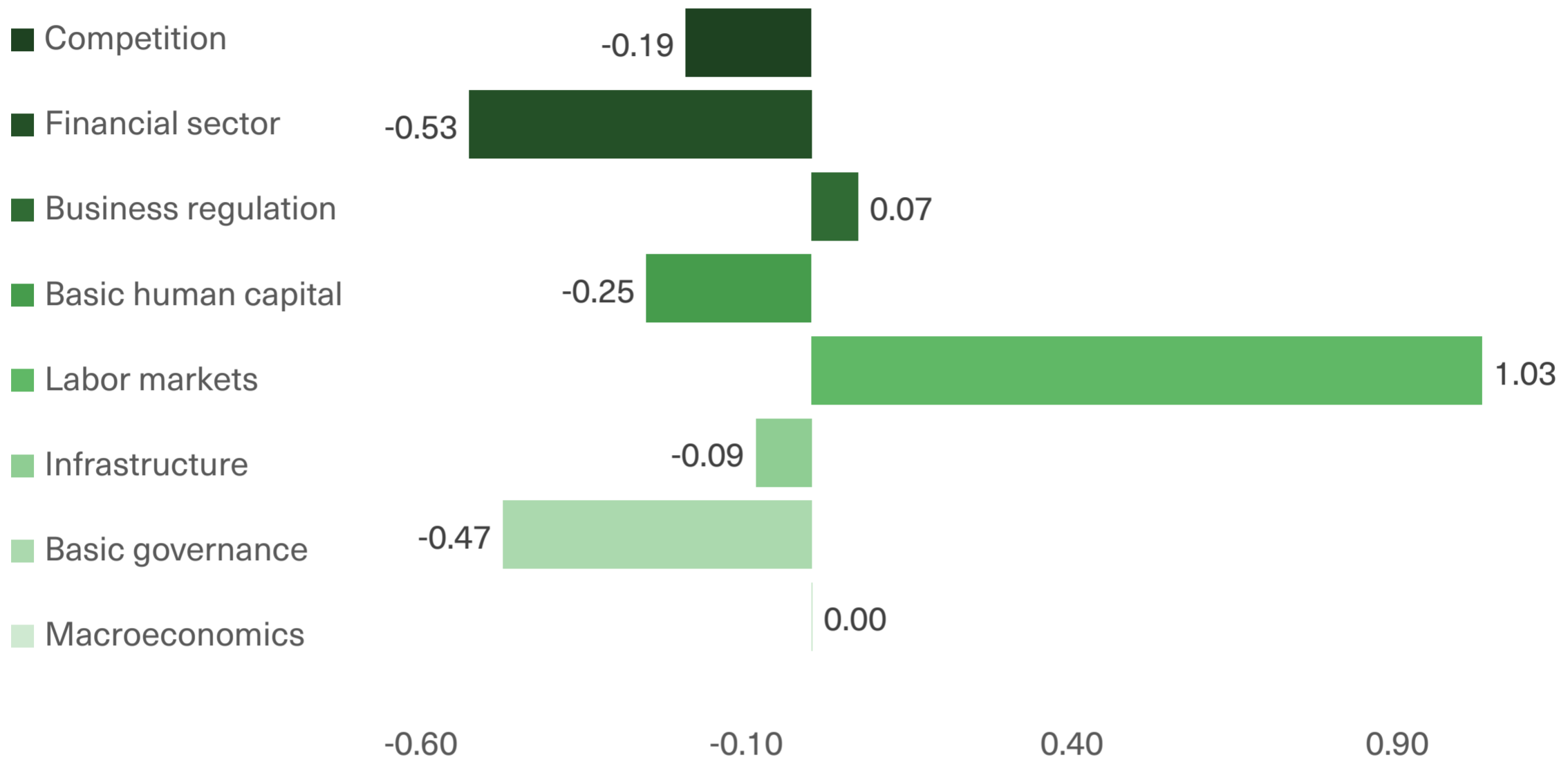
Grafik 23 – Z-score Region Kalimantan



Pada aspek *macroeconomics*, region Kalimantan memiliki simpangan positif yang cukup besar di banding rata-rata nasional, sedangkan aspek *basic governance* dan *basic human capital* sedikit berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, aspek *competition* dan *infrastructure* memiliki nilai simpangan negatif yang jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional, di mana hal ini sebagai salah satu efek dari keadaan geografis region Kalimantan yang didominasi oleh lahan gambut yang kurang stabil serta efek negatif dari proses kegiatan pertambangan. Dengan disahkannya UU IKN yang mengamankan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perkembangan infrastruktur untuk seluruh wilayah Kalimantan.

REGION SULAWESI

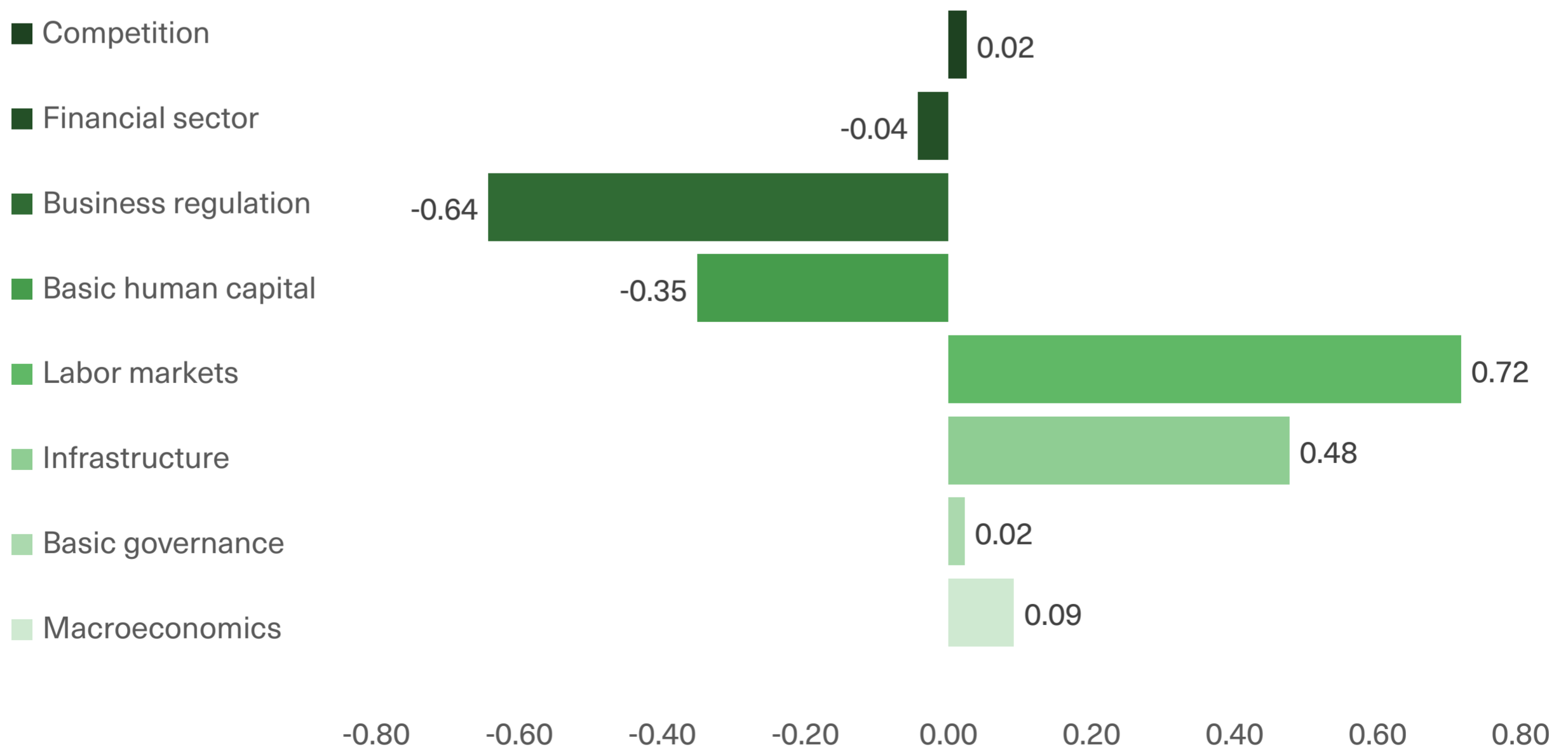
Grafik 24 – Z-score Region Sulawesi



Hal yang cukup menarik terlihat dari *z-score* region Sulawesi, di mana sebagian besar aspek menunjukkan simpangan yang negatif kecuali untuk *labor markets* yang digambarkan dengan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan *business regulation* yang menunjukkan nilai positif di mana skor penilaian PTSP untuk region Sulawesi berada di atas rata-rata nasional.

REGION BALI DAN NUSA TENGGARA

Grafik 25 – Z-score Region Bali dan Nusa Tenggara

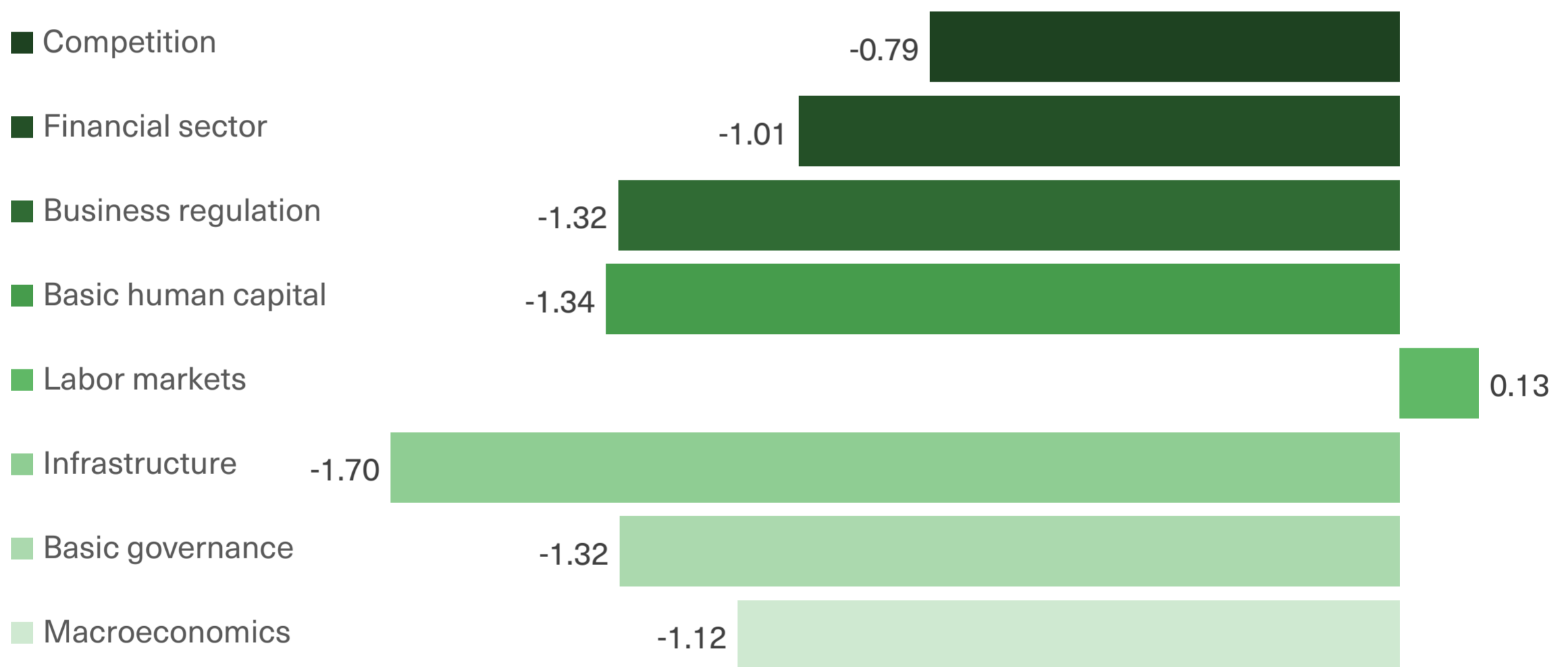


Region Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan performa beberapa sektor yang sedikit berada di atas rata-rata nasional yaitu *competition*, *basic governance*, dan *macroeconomics*. Adapun aspek *labor markets* dan *infrastructure* mempunyai nilai yang paling tinggi di antara aspek lainnya yang harus terus dijaga dan dipertahankan di kemudian hari.



REGION MALUKU DAN PAPUA

Grafik 26 – Z-score Region Maluku dan Papua



Pada region Maluku dan Papua, hampir semua sektor memiliki nilai negatif yang menunjukkan performa yang lebih rendah daripada rata-rata nasional kecuali aspek *labor markets*. Aspek *infrastructure*, *basic governance*, *business regulation*, dan *basic human capital* memiliki nilai simpangan negatif yang paling besar yang mencerminkan masih rendahnya kinerja pelayanan publik dan kualitas hidup di region Maluku dan Papua.

Analisa *z-score* yang membandingkan aspek unggulan dari setiap region ini menunjukkan bahwa region Jawa lebih unggul dalam aspek *basic governance* dan *competition*, sedangkan di region Kalimantan unggul dalam aspek *macro economics*. Adapun di region Maluku-Papua, Sulawesi dan Bali Nusra memiliki keunggulan di aspek *labor market*. Hal ini selaras dengan potensi ekonomi unggulan di regional tersebut yang cenderung *labor intensive*. Khusus untuk region Sulawesi, dominannya aspek *labor market* disertai oleh aspek *business regulation* yang mempunyai nilai sedikit di atas rata-rata. Sedangkan dominannya aspek *labor market* di region Bali-Nusra didukung oleh aspek *infrastructure* yang nilainya mendekati aspek *labor market*. Gambaran rapor reformasi struktural ini dapat merepresentasikan potensi dan keunggulan masing-masing region, sejalan dengan evaluasi capaian pembangunan dan potensi ekonomi yang terdapat pada KEM PPKF Regional yang telah ditetapkan dan menjadi bagian dari KEM PPKF Nasional melalui KMK 172 tahun 2023.



KINERJA PELAYANAN PUBLIK

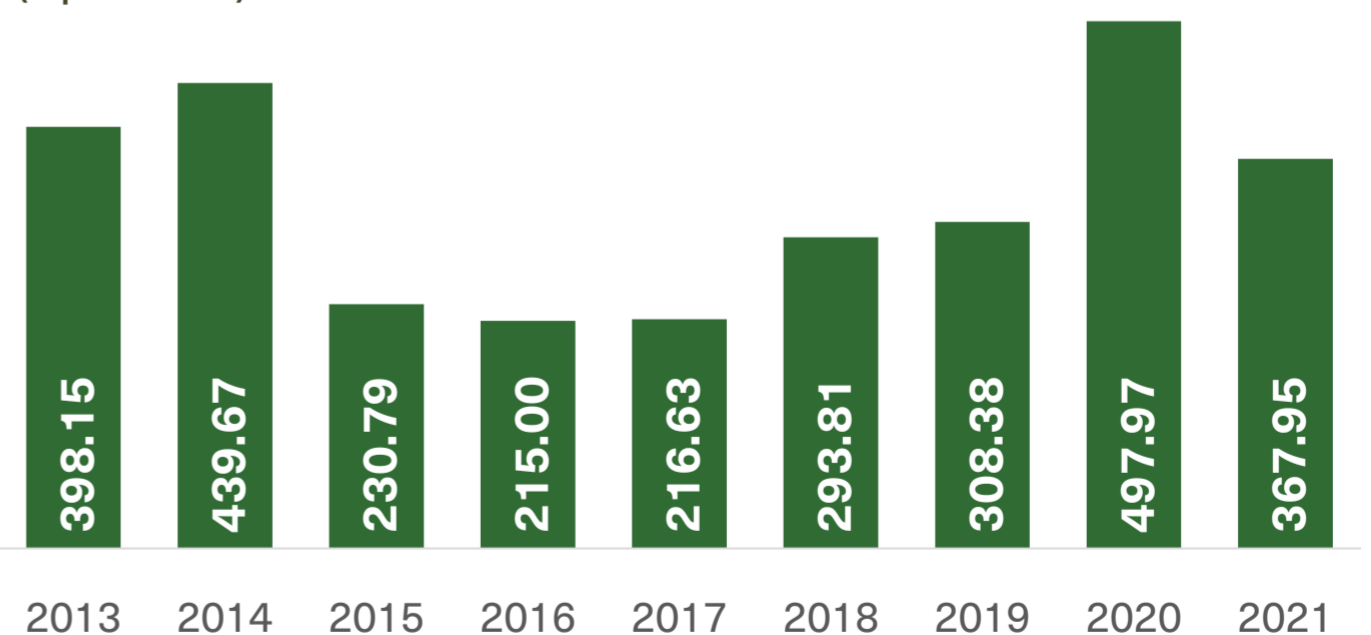
INDEKS SOSIAL EKONOMI

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat. Perekonomian nasional sempat berkontraksi 2,1% tahun 2020, namun secara bertahap mengalami pemulihan, tumbuh 3,7% di tahun 2021. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan *countercyclical* dalam penanganan pandemi cukup efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu prioritas pembangunan nasional Pemerintah Pusat tahun 2021 adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, dengan salah satu programnya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, di mana dalam rangka mewujudkan program tersebut, Pemerintah Pusat telah melakukan intervensi anggaran dengan mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp367,95 triliun. Grafik 14 di bawah menunjukkan gambaran alokasi dana perlindungan sosial dari tahun 2013 s.d. 2021.

Grafik 14 – Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2013-2021

(Rp Triliun)



Sumber: DJPK, diolah

Dalam rangka menilai pencapaian keberhasilan pemerintah dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan memberikan dasar data pembandingan dalam mengukur pencapaian program pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan untuk melengkapi serta memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari sumber data yang lain, maka disusunlah indeks sosial ekonomi ini sebagai pelengkap DTKS dari perspektif yang lebih umum atau luas.

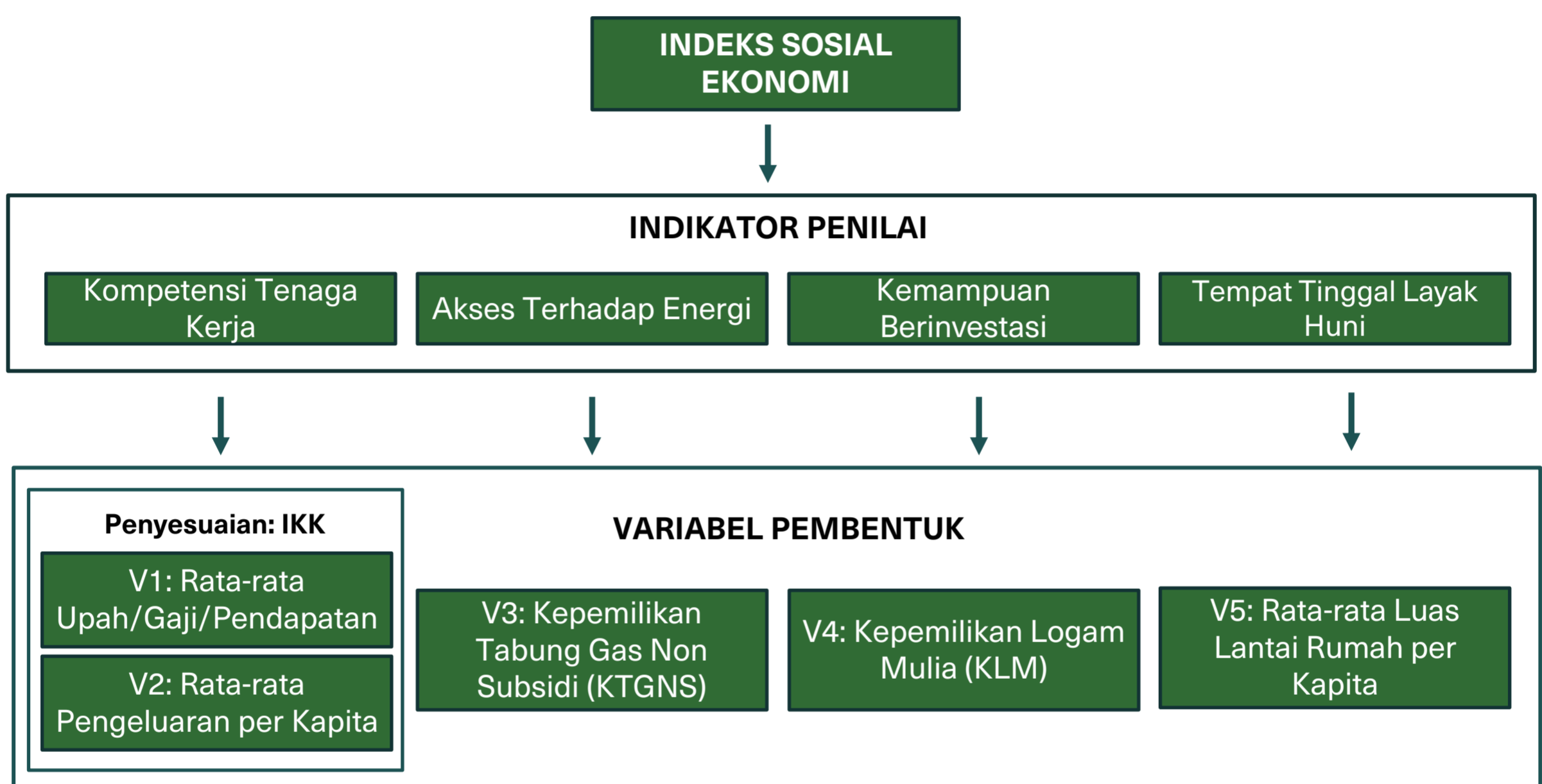
Indeks Sosial dan Ekonomi merupakan **indeks komposit** yang dapat diartikan sebagai indikator atau alat ukur yang dapat merepresentasikan keberhasilan pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi secara lebih komprehensif. Data atau indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ini bersumber dari publikasi BPS, yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang diterbitkan setiap tahun.

PENYUSUNAN INDEKS SOSIAL EKONOMI

Kerangka konseptual unsur pembentuk indeks sosial ekonomi dapat dilihat pada Grafik 15. Variabel yang digunakan dalam penyusunan indeks merupakan indikator yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi atau kesejahteraan masyarakat di daerah. Metodologi pemilihan variabel pada *Socio-Economic Indexes for Areas* (SEIFA) yang disusun Australian Bureau of Statistics dijadikan rujukan dalam penentuan variabel mikro, dalam hal ini adalah:

- Income and Spending Variables* direpresentasikan dengan Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan (RUGP) dan Rata-rata Pengeluaran per Kapita (RRPK) yang disesuaikan dengan menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
- Energy Consumption Variables* direpresentasikan oleh variabel Kepemilikan Tabung Gas Non Subsidi (KTGNS);
- Investment Variables* direpresentasikan dengan Kepemilikan Logam Mulia (KLM); dan
- Housing Variables* yang diindikasikan dengan variabel Rata-rata Luas Lantai Rumah Per Kapita (RLLRK).

Grafik 15 – Kerangka Penyusun Variabel Indeks Sosial Ekonomi



Untuk mendapatkan hasil Indeks Sosial Ekonomi dilakukan dengan *Principal Component Analysis* (PCA). Analisis ini menggunakan *cross-section* data pada 542 Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2021. Variabel yang digunakan untuk menghitung indeks sosial ekonomi pada level provinsi dan kabupaten/kota antara lain Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan (RUGP), Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (RRPK), Kepemilikan Tabung Gas Non Subsidi (KTGNS), Kepemilikan Logam Mulia (KLM), dan Rata-rata Luas Lantai Rumah Per Kapita (RLLRK).

HASIL ANALISIS INDEKS SOSIAL EKONOMI

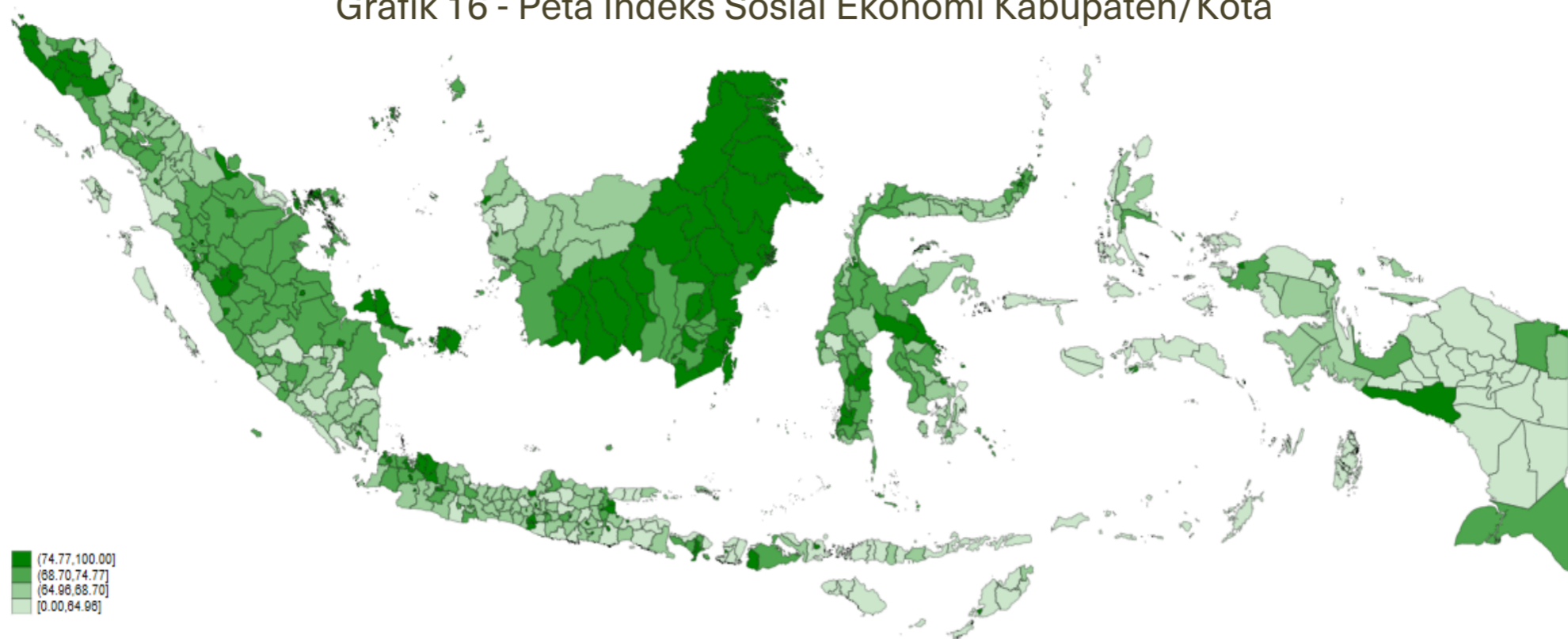
Tabel 6 – Sebaran Indeks Sosial Ekonomi Nasional

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Indeks Provinsi	34	70,66	13,58	40,79	100
Indeks Kab/Kota	508	45,66	14,28	8,63	100

Sebagaimana terlihat pada Tabel 6, indeks sosial ekonomi bernilai 8,63-100, yang mana nilai 100 merupakan daerah dengan kondisi terbaik dibandingkan dengan daerah lain. Semakin tinggi nilai indeks sosial ekonomi suatu daerah, maka semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Rata-rata indeks pada level provinsi sebesar 70,66 dan pada level kabupaten/kota sebesar 45,66.

1. Gambaran Indeks Sosial Ekonomi Kabupaten/Kota

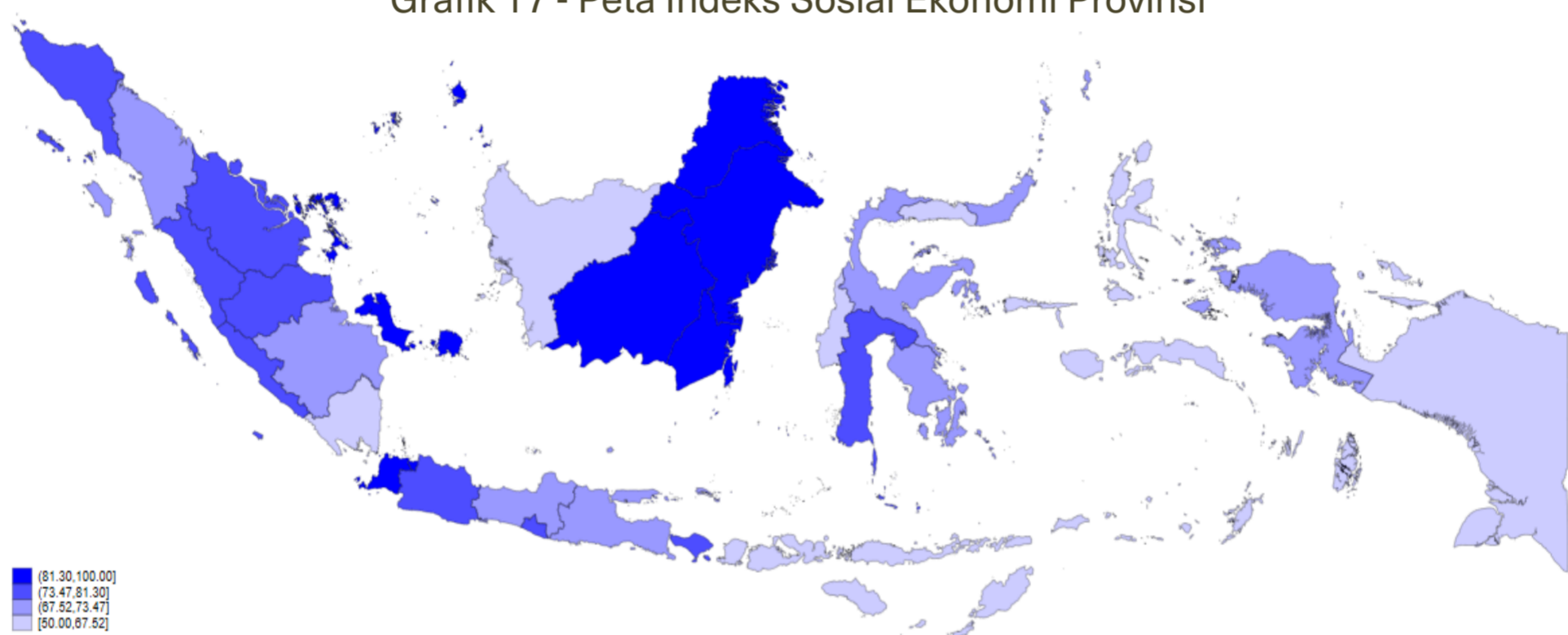
Grafik 16 - Peta Indeks Sosial Ekonomi Kabupaten/Kota



Berdasarkan sebaran indeks pada 415 kabupaten, didapatkan rata-rata indeks sosial ekonomi sebesar 41,82 sementara sebaran indeks pada 93 kota didapatkan rata-rata indeks sosial ekonomi sebesar 62,78. Melihat kondisi tersebut, **wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi** dibandingkan wilayah kabupaten.

2. Gambaran Indeks Sosial Ekonomi Provinsi

Grafik 17 - Peta Indeks Sosial Ekonomi Provinsi



Berdasarkan sebaran indeks pada 34 provinsi, adanya kecenderungan provinsi dengan **indeks tinggi berada di wilayah barat**, sementara provinsi dengan nilai indeks rendah berada di wilayah timur dan sebagian di barat.

3. Indeks Sosial Ekonomi Tertinggi dan Terendah

Tabel 7 – Pemerintah Daerah Indeks Sosial Ekonomi Tertinggi

5 Besar Indeks Sosial Ekonomi Tertinggi								
Provinsi			Kabupaten			Kota		
No.	Pemda	Indeks	No.	Pemda	Indeks	No.	Pemda	Indeks
1	Provinsi DKI Jakarta	100,00	1	Kab. Lamandau	80,05	1	Kota Banda Aceh	100,00
2	Provinsi Kalimantan Timur	95,94	2	Kab. Berau	78,13	2	Kota Bontang	92,90
3	Provinsi Kepulauan Riau	91,48	3	Kab. Tana Tidung	76,28	3	Kota Balikpapan	92,65
4	Provinsi Kalimantan Utara	89,90	4	Kab. Malinau	73,16	4	Kota Tangerang Selatan	89,93
5	Provinsi Banten	88,33	5	Kab. Kutai Timur	73,12	5	Kota Bekasi	88,91

Pada level provinsi, nilai indeks sosial ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 100, sementara indeks terendah adalah sebesar 40,79 yang berada di Provinsi Papua. Pada level kabupaten/kota, nilai indeks tertinggi adalah sebesar 100 yang didapat Kota Banda Aceh, sementara indeks terendah adalah Kab. Puncak sebesar 8,63. Disparitas antara tertinggi dan terendah pada level provinsi sebesar 59,21 dan pada level kabupaten/kota sebesar 91,37. Besarnya disparitas tertinggi dan terendah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi antar wilayah.

Tabel 8 – Pemerintah Daerah Indeks Sosial Ekonomi Terendah

5 Besar Indeks Sosial Ekonomi Terendah								
Provinsi			Kabupaten			Kota		
No.	Pemda	Indeks	No.	Pemda	Indeks	No.	Pemda	Indeks
1	Provinsi Maluku Utara	58,30	1	Kab. Mamberamo Tengah	13,94	1,00	Kota Pagar Alam	39,57
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	57,74	2	Kab. Tolikara	11,67	2,00	Kota Tanjung Balai	38,22
3	Provinsi Maluku	51,62	3	Kab. Deiyai	11,48	3,00	Kota Gunungsitoli	36,67
4	Provinsi Nusa Tenggara Timur	49,60	4	Kab. Intan Jaya	10,64	4,00	Kota Subulussalam	34,67
5	Provinsi Papua	40,79	5	Kab. Puncak	8,63	5,00	Kota Tual	30,65

4. Sebaran Indeks Berdasarkan Wilayah

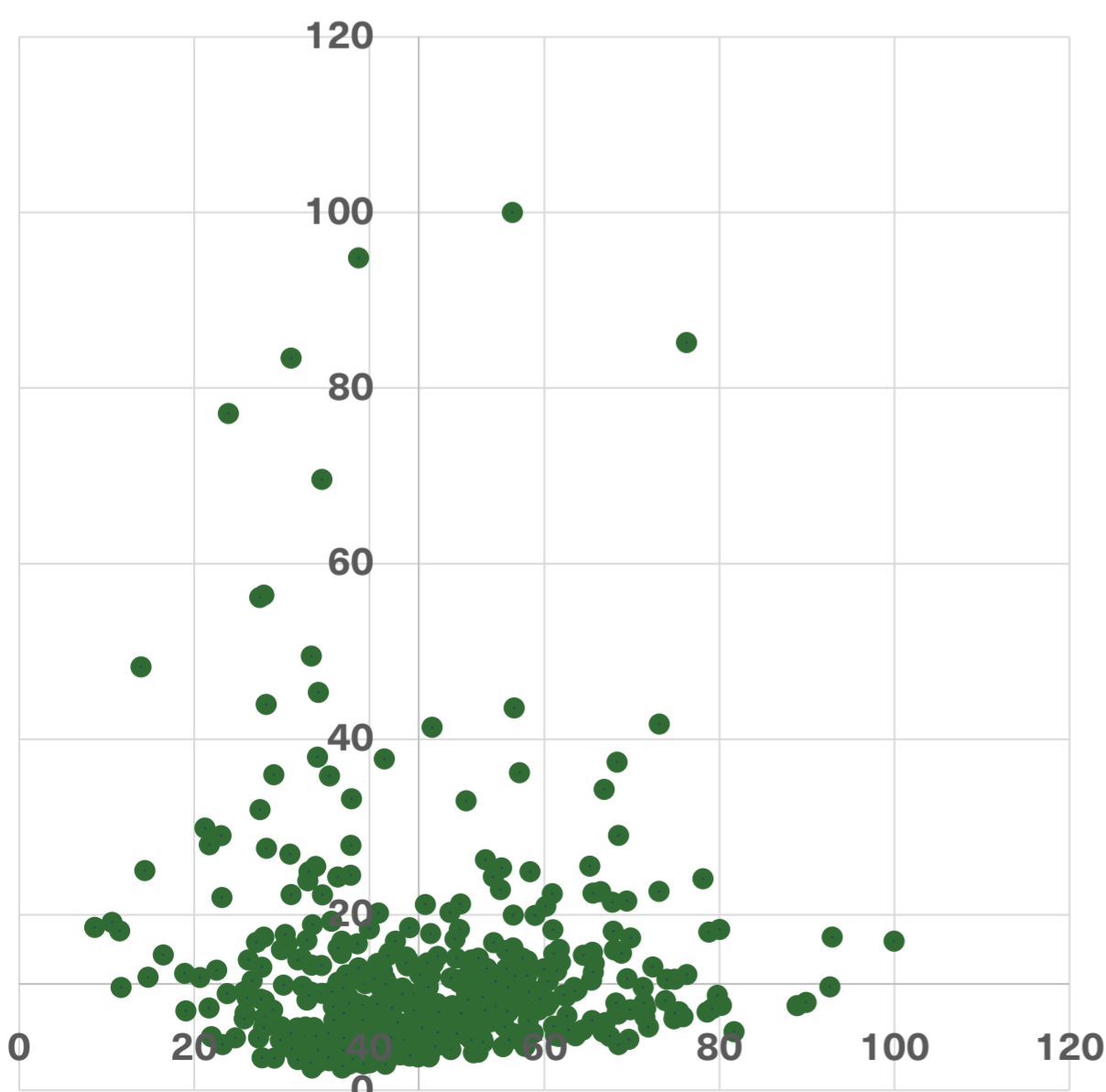
Untuk memahami tingkat ketimpangan kondisi sosial ekonomi secara nasional, perlu dilihat juga sebaran indeks sosial ekonomi per wilayah. Sebagaimana terlihat pada Tabel 7, rata-rata indeks sosial ekonomi tertinggi berada di wilayah barat, yaitu Kalimantan (81,88), Jawa (78,04), dan Sumatera (73,03). Sementara itu, wilayah timur memiliki rata-rata indeks terendah, yakni Bali dan Nusa Tenggara (60,93) serta Maluku dan Papua (53,32). Hal tersebut juga dikonfirmasi data pada tabel sebelumnya (Tabel 8), di mana pada level pemerintahan provinsi, tiga indeks terendah berada di wilayah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku

5. Hubungan Indeks Sosial Ekonomi dan Kapasitas Fiskal Daerah

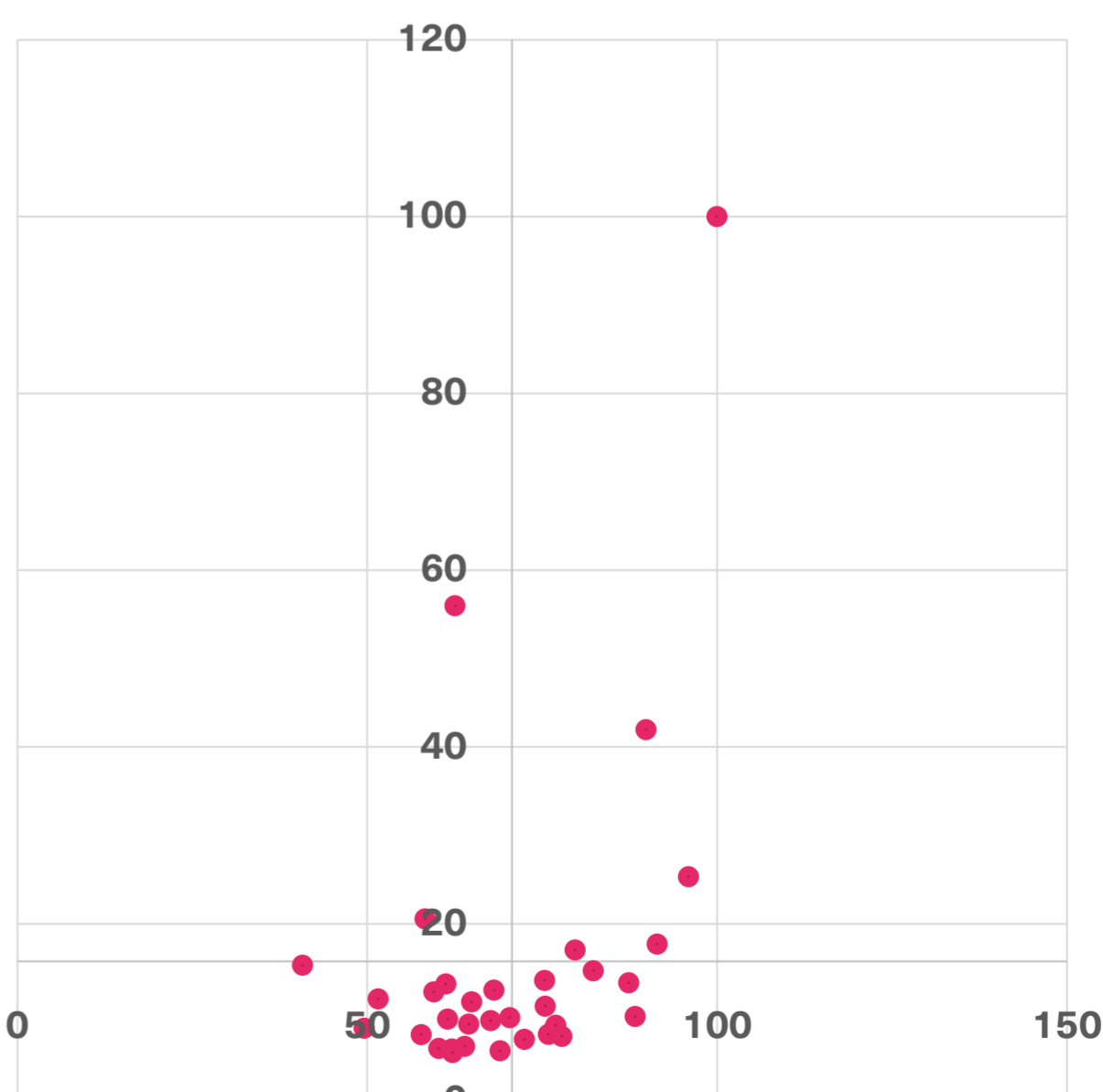
Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan setiap daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, tentunya semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat terutama dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk pembangunan di bidang sosial dan ekonomi.

Hubungan antara indeks sosial ekonomi dan indeks kapasitas fiskal daerah per kapita dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 18 - Peta kuadran Indeks Kapasitas Fiskal Per Kapita dan Indeks Sosial Ekonomi Kabupaten dan Kota



Grafik 19 - Peta kuadran Indeks Kapasitas Fiskal Per Kapita dan Indeks Sosial Ekonomi Provinsi



Daerah dengan indeks kapasitas fiskal per kapita dan indeks sosial ekonomi rendah seyogyanya menjadi **prioritas utama** dalam pengalokasian belanja bantuan sosial.

Berdasarkan kuadran yang ditampilkan pada dua grafik sebelumnya, secara umum, sebagian besar daerah berada di kuadran III, di mana memiliki indeks kapasitas fiskal per kapita rendah begitu juga indeks sosial ekonominya. Secara rinci, terdapat 17 provinsi dan 211 kab/kota yang terletak di kuadran III yang seharusnya mendapatkan alokasi bantuan sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, begitu juga sebaliknya daerah dengan indeks kapasitas fiskal per kapita tinggi dan indeks sosial ekonomi tinggi yang berada pada kuadran I seharusnya mendapatkan alokasi yang relatif lebih kecil.

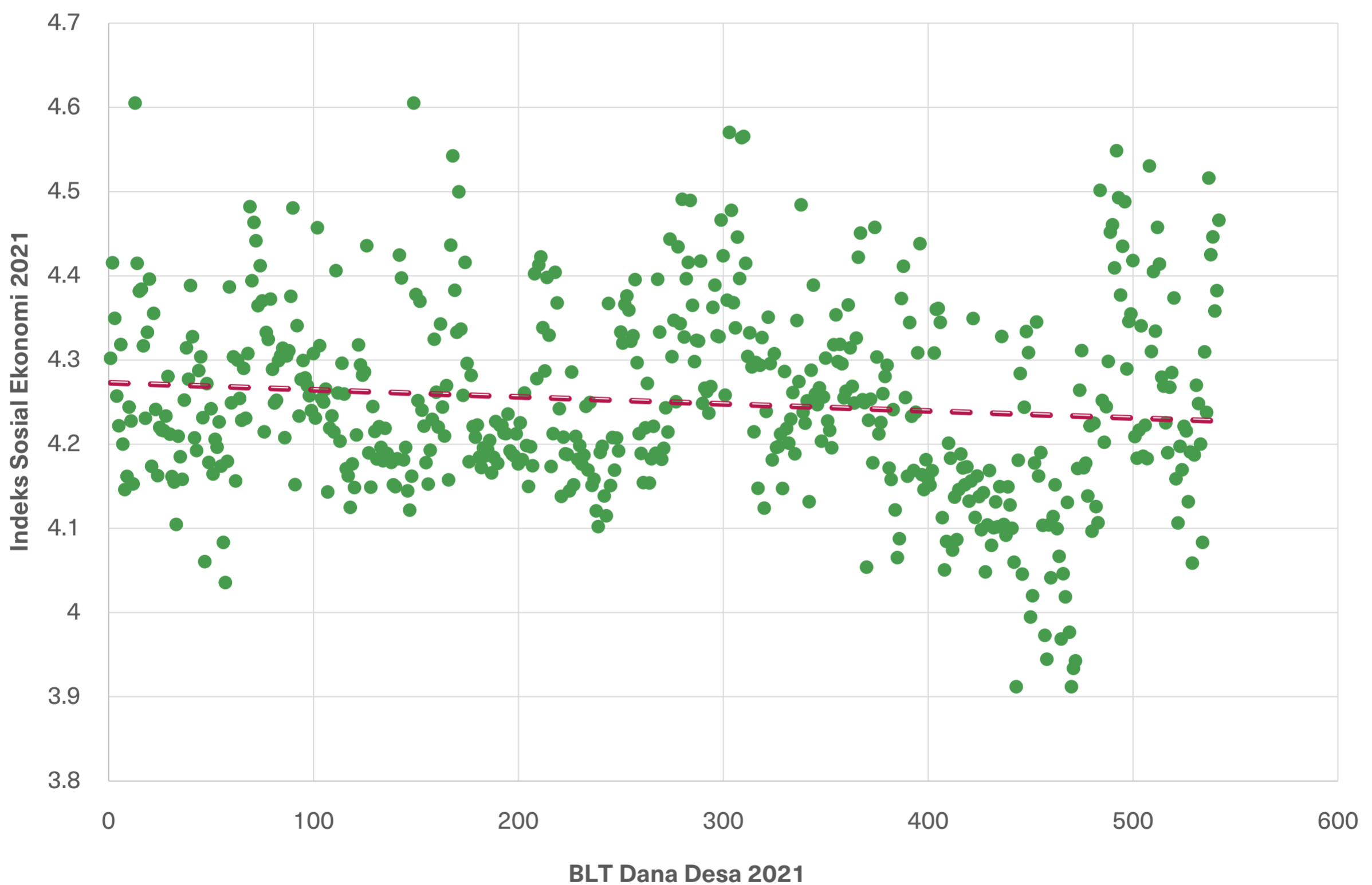
Untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal per kapita tinggi tetapi masih memiliki indeks sosial ekonomi yang rendah, maka perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pada pemerintah tersebut untuk lebih mengalokasikan pendapatan dan fokus kepada perbaikan dan peningkatan pembangunan sektor sosial ekonomi.

6. Hubungan Indeks Sosial Ekonomi dan BLT Dana Desa Per Kapita

Indeks sosial ekonomi dapat digunakan untuk pemetaan dan mengetahui kondisi sosial ekonomi di daerah. Selain itu, hasil yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah dalam pengalokasian belanja dalam APBN, khususnya belanja bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran. Indeks ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi implementasi program bantuan sosial yang telah dilaksanakan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

BLT Dana Desa pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp20,24 triliun kepada kurang lebih 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebaran daerah penerima beserta nilai indeks sosial ekonominya tergambar sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 20 - Scatterplot BLT Dana Desa Per Kapita dan Indeks Sosial Ekonomi Tahun 2021



Dari grafik di atas, terlihat bahwa semakin tinggi nilai indeks sosial ekonomi, semakin rendah nilai BLT Dana Desa per kapita daerah tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa **pelaksanaan BLT Dana Desa tahun 2021** sudah **relatif baik**, yakni pengalokasiannya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat. Namun demikian, tingkat kemiringan yang tidak terlalu tinggi mengindikasikan bahwa korelasi tersebut masih relatif **belum cukup kuat**. Untuk itu, **perbaikan dan pemutakhiran** data yang mendukung program-program jaring pengaman sosial harus dilakukan secara berkesinambungan.



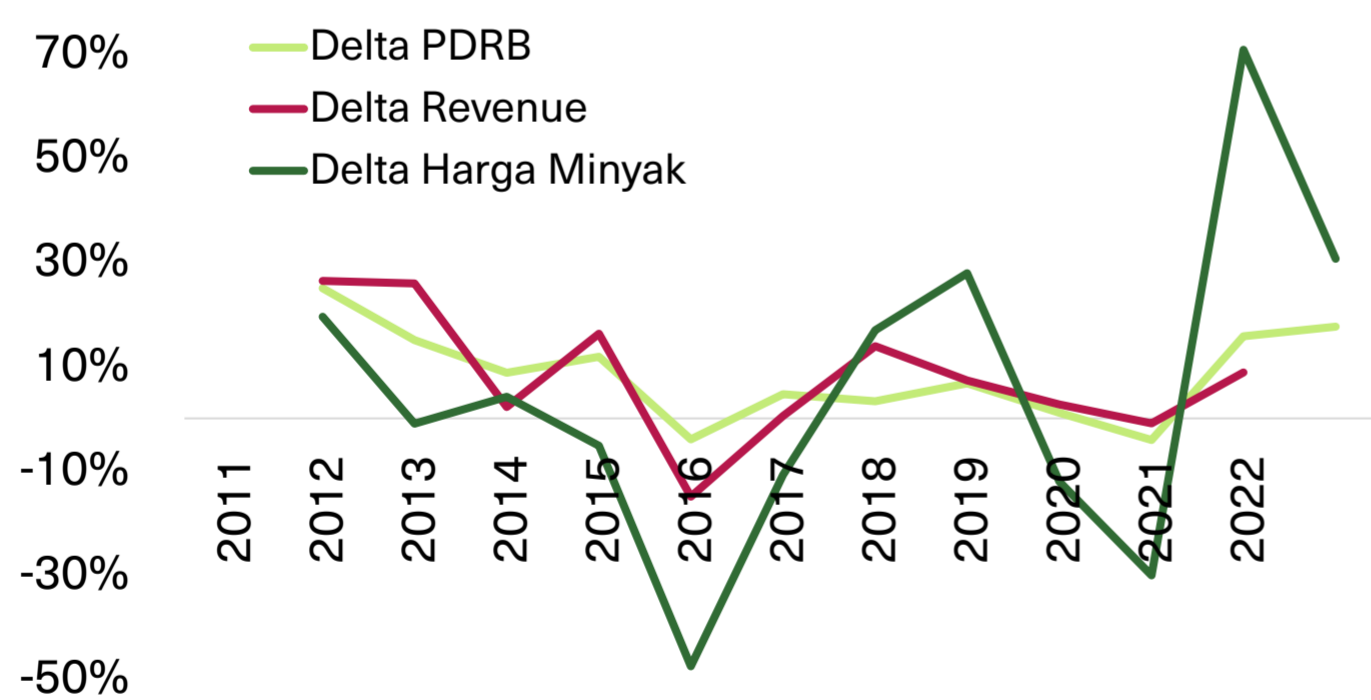
KAJIAN KHUSUS

URGENSI ASSESSMENT RISIKO FISKAL DAERAH: STUDI KASUS PROVINSI RIAU

Setelah tajuk sebelumnya membahas berkaitan dengan penguatan kinerja ekonomi regional, pada tajuk berikut ini akan diulas bagaimana **risiko fiskal** yang berasal dari daerah perlu dilakukan mitigasi agar kesehatan fiskal daerah maupun pusat lebih terjaga. Pada tajuk kali ini, wilayah Provinsi Riau dipilih menjadi studi kasus pentingnya assessment risiko fiskal daerah.

Wilayah Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat bergantung pada sektor migas untuk pendapatan daerahnya. Sebagai salah satu wilayah provinsi dengan penghasil minyak terbesar di Indonesia, fluktuasi harga minyak dunia memiliki dampak yang signifikan terhadap risiko fiskal pemerintah daerah di wilayah ini khususnya saat terjadi *shortfall* yaitu menurunnya harga minyak dunia secara drastis yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan. Kajian khusus kali ini akan membahas tentang risiko fiskal yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau akibat dampak fluktuasi harga minyak terhadap penerimaan daerah.

Grafik 27 – Pergerakan PDRB, Harga Minyak, dan Penerimaan Daerah Provinsi Riau



Kita memahami bahwa harga minyak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan daerah Provinsi Riau. Ketika harga minyak dunia naik, penerimaan daerah akan meningkat karena pendapatan dari sektor migas juga akan meningkat. Namun, sebaliknya, ketika harga minyak turun, penerimaan daerah pun akan menurun drastis. Fluktuasi harga minyak yang sering kali tidak terduga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan daerah dan dapat mengganggu

stabilitas fiskal. Kita dapat mencermati dari grafik berikut bagaimana pergerakan PDRB Provinsi Riau, Harga Minyak Mentah dunia, dan penerimaan daerah Provinsi Riau yang dicerminkan dari selisih dari periode sebelumnya (*first difference*) memiliki pola pergerakan yang sama.

RISIKO FISKAL DAERAH PROVINSI RIAU AKIBAT KETERGANTUNGAN PADA SEKTOR MIGAS

Ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada sektor migas, terutama minyak, dapat mengakibatkan risiko fiskal yang signifikan. Ketika harga minyak rendah, pendapatan daerah akan menurun tajam, menyebabkan daerah akan kesulitan dalam membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Pemerintah daerah menjadi lebih rentan terhadap perubahan ekonomi global yang dapat mengganggu keseimbangan anggaran.

STRUKTUR EKONOMI YANG RELATIF HOMOGEN

Salah satu masalah utama yang menyebabkan risiko fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah kurangnya diversifikasi pendapatan. Ketergantungan yang tinggi pada sektor migas membuat provinsi ini belum memiliki alternatif sumber-sumber pendapatan lain yang dapat menjadi penopang ketika harga minyak mengalami penurunan. Upaya diversifikasi ekonomi dan pendapatan perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko fiskal akibat fluktuasi harga minyak. Jika kita melihat sektor-sektor utama ekonomi di Provinsi Riau, dari tahun 2016-2022, sektor pertambangan dan sektor pertanian masih mendominasi kegiatan ekonomi di wilayah Provinsi Riau.

Tabel 9 – LQ Provinsi Riau Tahun 2016-2022

SEKTOR		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,94	2,03	2,11	2,18	2,23	2,27	2,28	2,15
2	Pertambangan dan Penggalian	2,64	2,50	2,39	2,28	2,16	2,02	1,99	2,28
3	Industri Pengolahan	1,21	1,24	1,26	1,30	1,35	1,35	1,35	1,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,23	0,23	0,24	0,26	0,32	0,32	0,35	0,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16
6	Konstruksi	0,78	0,80	0,82	0,84	0,84	0,83	0,85	0,82
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,64	0,65	0,68	0,68	0,63	0,66	0,70	0,66
8	Transportasi dan Pergudangan	0,21	0,21	0,21	0,21	0,18	0,19	0,19	0,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,14	0,14	0,14
10	Informasi dan Komunikasi	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,25	0,26	0,24
12	Real Estat	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,51	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,53	0,51
15	Jasa Pendidikan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18
17	Jasa Lainnya	0,28	0,28	0,30	0,30	0,25	0,26	0,26	0,28

Sumber: BPS, diolah

Beberapa argumen di atas menjadi lebih menarik dan memberikan konsekuensi yang patut diwaspadai oleh Pemerintah Provinsi Riau ketika pemerintah pusat pada tahun 2021 pernah menyatakan bahwa cadangan minyak nasional akan habis dalam waktu 9,5 tahun lagi (Kemen ESDM, 2021). Hal ini mengasumsikan setiap harinya produksi minyak nasional rata-rata sebesar 700 ribu barrel. Pernyataan ini juga bukan tanpa alasan, karena pada tahun 2021 cadangan terbukti (*proven reserves*) adalah sebesar 2,17 Miliar barrel, meskipun ada juga cadangan belum terbukti (*unproven reserves*) sebesar 2,44 Miliar barrel. Berdasarkan tabel LQ di atas, jika sektor-sektor lain tidak segera didukung dan dikembangkan untuk menopang perekonomian di Provinsi Riau, bukan tidak mungkin Provinsi Riau akan mengalami guncangan fiskal yang cukup berat dimasa mendatang. Tidak hanya Provinsi Riau, namun APBN juga perlu mempersiapkan **skenario pendanaan lain** untuk Provinsi Riau apabila DBH Migas turun signifikan.

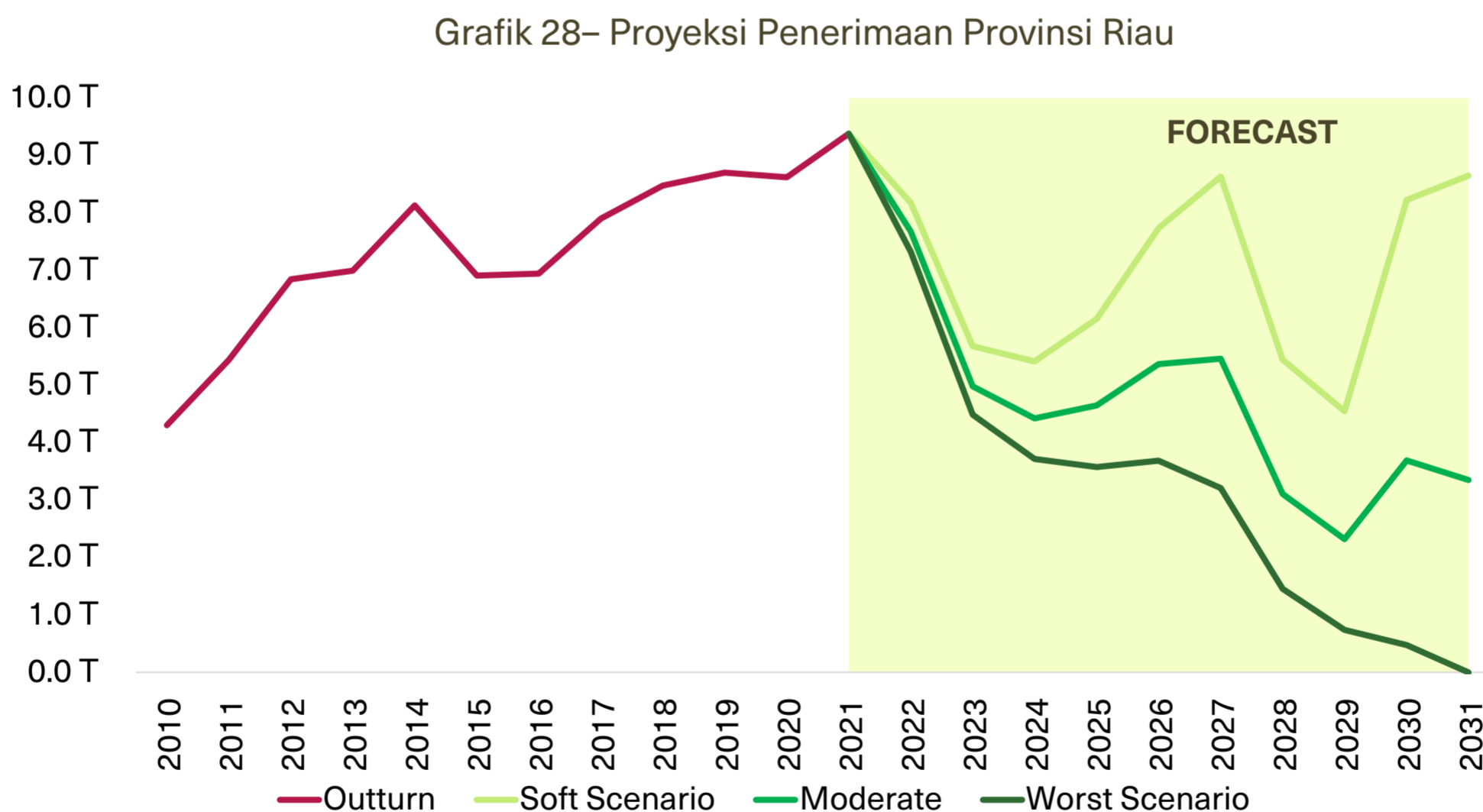
SENSITIVITY/SCENARIO ANALYSIS

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, pengujian sensitivitas atau *scenario analysis* dilakukan atas penerimaan atau *revenue* dari Provinsi Riau yang sangat bergantung pada sektor migas sampai dengan tahun 2031. Skenario pertama adalah merupakan skenario tipe lunak (*soft scenario*) dimana *revenue* atau pendapatan Provinsi Riau sampai dengan tahun 2031 mengikuti pula distribusi normal sebagaimana penerimaan Provinsi Riau selama ini.

Skenario tipe lunak ini dilakukan dengan menggunakan simulasi statistik (*montecarlo simulation*) atas tren atau histori penerimaan Provinsi Riau dimasa lalu. Hal ini mengabaikan fakta bahwa cadangan minyak di Provinsi Riau akan habis atau dengan kata lain diasumsikan akan ditemukan cadangan minyak baru sebelum habisnya cadangan minyak yang sekarang.

Skenario kedua adalah **skenario moderat** (*moderate*) di mana diasumsikan mengikuti produksi minyak nasional sebesar 700 ribu barrel per hari dengan cadangan sebesar 4,17 Miliar barrel di tahun 2021 maka dari tahun 2021 cadangan minyak akan habis di tahun 2037. Perhitungan skenario dilakukan secara proporsional terhadap estimasi penurunan cadangan minyak tersebut, dimana penurunan penerimaan Provinsi Riau dilakukan estimasi sedemikian rupa sehingga jika tidak ada perubahan struktur ekonomi dan sumbangan penerimaan lain, maka penerimaan Provinsi Riau akan semakin menyusut sampai habis di tahun 2037. Asumsi tersebut digunakan sesuai dengan surat edaran Kementerian ESDM terkait dengan cadangan minyak di Indonesia pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Skenario ketiga atau **skenario terburuk** (*worst scenario*) merupakan ramalan penerimaan Provinsi Riau di mana cadangan minyak yang terbukti (*proven reserves*) adalah sebesar 2,44 Miliar barrel. Sehingga dengan cadangan minyak Indonesia tersebut dan dengan produksi 700 ribu barrel per hari, maka cadangan minyak akan habis 9,5 tahun sejak tahun 2021 atau akan habis pada tahun 2031. Sebagaimana skenario kedua, proporsional terhadap cadangan minyak dan produksi minyak di Provinsi Riau, studi ini kembali melakukan estimasi terhadap penerimaan Provinsi Riau di mana penerimaan Provinsi Riau akan menyusut sampai dengan habis pada tahun 2031. Gambaran ketiga skenario di atas dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Dari grafik tersebut kita dapat melihat bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Riau berpotensi kehilangan atau mengalami penyusutan penerimaan daerah sebagai akibat begitu bergantungnya penerimaan Provinsi Riau dari sektor minyak. Total *expected loss* dari skenario *moderate* adalah penurunan penerimaan daerah sebesar 6% setiap tahunnya sedangkan pada skenario terburuk (*worst scenario*) adalah sebesar 10% setiap tahunnya.

Jika cadangan minyak baru belum ditemukan atau ditemukan namun belum dapat dieksplorasi, maka kemungkinan besar skenario-skenario dari moderat sampai terburuk sebagaimana grafik 1 dapat terjadi pada Provinsi Riau. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan upaya lebih untuk diversifikasi ekonomi dan penyiapan dana darurat yang sifatnya sebagai cadangan dalam menghadapi situasi-situasi sulit dimasa mendatang.

UPAYA MITIGASI RISIKO

Untuk mengatasi risiko fiskal akibat dampak harga minyak terhadap penerimaan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Riau perlu mengambil beberapa tindakan strategis:



Diversifikasi Ekonomi

Pemerintah daerah harus mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor non-migas, seperti konstruksi, Industry pengolahan, pertanian, dan bahkan pariwisata. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada sektor migas.



Penyusunan Anggaran Konservatif

Pemerintah daerah perlu menyusun anggaran dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan skenario harga minyak yang bervariasi. Anggaran yang konservatif akan membantu mengantisipasi fluktuasi harga minyak.



Pengelolaan Cadangan Keuangan:

Membentuk cadangan keuangan atau dana stabilisasi dapat membantu meredam dampak negatif dari fluktuasi harga minyak. Dana ini dapat digunakan saat harga minyak turun tajam untuk menjaga stabilitas fiskal. Pemerintah daerah Provinsi Riau juga dapat mencoba model **Dana Abadi Daerah** sebagai langkah awal menjaga *fiscal sustainability*.



Kolaborasi dan Investasi

Pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek investasi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sumber-sumber lain selain migas. Pemerintah daerah Provinsi Riau dapat mencoba mengembangkan sumber-sumber pendanaan alternatif seperti KPBU, Obligasi Daerah, dll.



Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mengoptimalkan pendapatan yang ada dan mengurangi risiko pemborosan. Pemerintah Provinsi Riau dapat mulai menggunakan batasan pegawai sesuai UU HKPD, menggunakan standar harga satuan regional, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Assessment risiko fiskal daerah perlu terus dilakukan secara reguler untuk memberikan *awareness* terhadap para pengambil keputusan terutama kepala daerah yang terkait untuk memberikan gambaran potensi gangguan keberlangsungan fiskal daerah. Hal ini juga pastinya akan **berdampak pada pemerintah pusat**, karena pemerintah pusat berkewajiban membantu menjaga keberlangsungan fiskal dan program pembangunan di daerah.

Risiko fiskal yang dijelaskan sebelumnya menggunakan data Provinsi Riau namun demikian ini cukup menggambarkan bagaimana kondisi secara umum daerah-daerah di Provinsi Riau. Hal ini juga berlaku atau dapat dianalogikan bagi daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, misalnya daerah-daerah yang banyak bergantung pada sektor tambang seperti Aceh, Kalimantan, Papua, dan lainnya. Oleh karena itu, upaya *assessment* risiko fiskal daerah merupakan suatu hal yang penting untuk secara rutin dilakukan, guna memitigasi risiko yang dapat menyebabkan capaian-capaian fiskal (*fiscal outcome*) terganggu yang tentunya pada akhirnya akan menyebabkan terhambatnya pelayanan publik dan pembangunan di daerah.





INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah Provinsi DIY Dalam Assessment Risiko Fiskal Melalui Melalui Program Difagana Pioner Penanggulangan Bencana Berbasis Inklusi

Negara Indonesia berada di wilayah Cincin Api Pasifik yang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Sebagian besar lempeng tektonik di daerah Cincin Api Pasifik ini saling tumpang tindih pada batas konvergen yang disebut sebagai zona subduksi yang sering bergerak. Hal ini menyebabkan banyaknya gunung berapi dan sering terjadinya gempa bumi di wilayah Indonesia.

Hal ini tidak terkecuali di wilayah Provinsi DI Yogyakarta, di mana terdapat salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia yaitu Gunung Merapi. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan, Gunung Merapi telah mengalami erupsi setiap dua sampai lima tahun sekali. Terakhir, Gunung ini erupsi pada tanggal 11 Maret 2023 dengan mengeluarkan guguran awan panas dengan jarak luncur maksimal sekitar empat kilometer. Di sisi lain, Gunung Merapi dikelilingi oleh permukiman yang cukup padat sehingga apabila terjadi bencana di sekitar Merapi, akan mengakibatkan tragedi yang besar kepada penduduk sekitar. Bencana tersebut tak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Banyaknya korban jiwa dan kerugian material dalam peristiwa bencana dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah dan minimnya kesadaran masyarakat akan potensi kerentanan serta upaya mitigasi bencana.

Dengan frekuensi erupsi yang sering terjadi, Pemerintah DI Yogyakarta terus melakukan mitigasi untuk mengurangi risiko yang timbul, antara lain melalui penyiapan pos pantau Gunung Merapi lengkap dengan mekanisme *early warning system*-nya, membuat jalur evakuasi yang aman untuk penduduk, serta bersama dengan pemerintah daerah lain melakukan kolaborasi untuk dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari erupsi Gunung Merapi dengan tetap melibatkan peran serta dari masyarakat sekitar. Selain itu, kapasitas dalam menghadapi bencana di Provinsi DI Yogyakarta, dan juga di Indonesia, masih belum merata dan memerlukan penguatan pada semua aspek kapasitas.

Salah satu faktor yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih adalah golongan difabel, yang sering menjadi masyarakat nomor dua dan rentan terabaikan khususnya dalam kondisi darurat bencana. Keterbatasan dalam mengakses sarana prasarana fisik, informasi, pengetahuan dan keterampilan, serta kerentanan dalam sosial maupun ekonomi membuat penyandang difabel memiliki risiko tinggi saat terjadi bencana.

Namun demikian, sejak tahun 2016, Pemerintah DI Yogyakarta menginisiasi program Difabel Siaga Bencana (Difagana) yang merupakan program pemberdayaan penyandang difabel untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dalam menghadapi situasi bencana baik bagi dirinya sendiri, keluarga, tetangga maupun untuk kelompok rentan lainnya. Program ini didasari oleh konsep *peer to peer* yaitu memberdayakan difabel untuk sesama penyandang difabel serta menekankan kesamaan hak partisipasi dalam penanggulangan bencana. Hal ini menjadikan program Difagana dinilai lebih memiliki empati, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan sesama serta menumbuhkan kepedulian sosial masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, program ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu:

1. Memberikan aksesibilitas untuk penyandang difabel di dalam kelembagaan.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan melalui pemberian pelatihan serta *sharing knowledge* kepada setiap anggota Difagana.
3. Meningkatkan keterampilan penanggulangan bencana yang merupakan salah satu komponen pelaksanaan sistem manajemen bencana berbasis kelompok rentan.

Diklat serta pengetahuan yang diperoleh berupa pengelolaan *shelter*, *logistic*, dapur umum, mendirikan tenda, dan mitigasi bencana. Selain itu, tim Difagana juga dibekali pengetahuan tentang pendampingan sosial dan *trauma healing* serta pelatihan relawan bencana agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kerelawanan bencana,



Sumber: bantulkab.go.id

Program Difagana merupakan pelopor penanggulangan bencana oleh kaum difabel di Indonesia dengan mengusung manajemen bencana berbasis inklusi. Hal ini didasari bahwa Difagana memiliki cara yang unik dalam mengomunikasikan tujuan dan layanan kepada kaum difabel, mampu membangun empati dan sensitivitas dalam memahami kebutuhan sesamanya, serta mampu memetakan kebutuhan kaum difabel korban bencana untuk dapat menyediakan layanan yang tepat, aksesibel, dan berkualitas. Keberhasilan program ini terlihat dari banyak kaum difabel di Provinsi DI Yogyakarta yang ingin bergabung dan menjadi relawan Difagana yang turut aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan sosial lainnya.

Keberhasilan program Difagana semakin tidak terbendung di mana puncaknya terjadi pada tahun 2022. Di tahun yang sama, Kementerian PANRB menganugerahkan penghargaan berupa Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2022 kepada Provinsi DI Yogyakarta atas keberhasilan implementasi program Difagana yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB No. 289/2022 tentang Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMD, dan BUMD Tahun 2022. Lebih lanjut, keberhasilan program ini pun diadopsi oleh Kementerian Sosial untuk mewujudkan penanggulangan bencana berbasis inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Di Tahun bersamaan, Kementerian Sosial membentuk Difabel Siaga Bencana (Difagana) untuk memwadahi peran penyandang difabel, setelah sebelumnya membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana) di mana Difagana sebagai kelompok rentan, tergabung dalam Sahabat Tagana, seluruh proses penanggulangan bencana diharapkan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, antar generasi dan antar kalangan sehingga lebih inklusif.

Dari uraian keberhasilan program dalam mengatasi bencana di atas, kita dapat mengambil pelajaran tentang proses inovasi dalam memitigasi risiko yang sering terjadi di suatu daerah yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kondisi keuangan daerah tersebut. Secara umum, upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat dampak bencana alam terhadap kondisi keuangan daerah, antara lain:



Keikutsertaan dalam skema *pooling fund* bencana

Membentuk cadangan keuangan atau dana stabilisasi yang dapat membantu meredam dampak tak terduga dari munculnya bencana alam. Dana ini dapat digunakan saat terjadi bencana untuk menjaga stabilitas fiskal. Hal ini pun sejalan dengan rumusan kebijakan Pemerintah Pusat untuk membentuk *pooling fund* bencana sebagai langkah awal menjaga *fiscal sustainability*. Saat ini RPMK tentang *Pooling Fund* Bencana sedang dalam proses penyusunan di mana salah satunya akan mengatur besaran kontribusi pemerintah daerah serta skema pemanfaatannya.



Kolaborasi

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dapat menjalin kerja sama dengan pemda lain di sekitar Gunung Merapi maupun dengan sektor swasta untuk lebih meningkatkan kualitas jalur evakuasi, terutama yang lebih ramah terhadap kaum difabel. Selain itu, kerja sama dengan pemda lain pun dapat berupa pembentukan Dana Abadi Daerah regional, yaitu khusus untuk wilayah yang sering terdampak oleh erupsi Gunung Merapi.



Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Merupakan salah satu faktor kunci dalam pengelolaan keuangan daerah, karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi risiko pemborosan anggaran. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dapat mulai menggunakan batasan jumlah belanja pegawai sesuai dengan amanat UU HKPD, menggunakan standar harga satuan regional, dan lain-lain.

Pepatah lama mengatakan bahwa ***“If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together”***. Pengelolaan risiko fiskal daerah serta pengelolaan bencana merupakan suatu proses yang terus menerus karena kita tinggal di Kawasan cincin api. Untuk itu, kolaborasi antar Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak Swasta harus menjadi prioritas utama untuk mengatasi permasalahan tersebut.



**DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN**

Luky Alfirmman • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Radies Kusprihanto Purbo • Britany Alasen Sembiring • Muhammad Hijrah • Rian Kelana Ednur •
Ananta Sugiyarto • Rossi Rizki Bestari • Adi Saputra • Efriyazwar • Amelia Imanda Yusuf • Muhammad
Harry Kurniawan • Magdalena Pohan • Deni Candra N. • Kharisma Permata Karunianingtyas